

**MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)**

**(Studi Analisis di Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten.Kendal)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Program Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesehatan Lingkungan

Oleh:

Indah Nur Fitrianiingsih

131411016

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Usulan Skripsi

Kepada.
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan
sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Indah Nur Fitrianingsih
NIM : 131411016
Fak./Jur. : Dakwah dan Komunikasi / PMI
Judul Skripsi : **Model Pengembangan Masyarakat melalui Program
KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). (Studi Analisis di
Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kendal)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Desember 2017

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

* Bidang Metodologi & Tatatulis


Ahmad Faqih, S.Ag., M.Si
NIP. 19730308 199703 1 004


Drs. Kasmuri, M.Ag
NIP. 19660822 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website www.fakdakom.walisongo.ac.id

SKRIPSI

**MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KOTAKU
(Kota Tanpa Kumuh)**

(Studi Analisis di Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)

Disusun oleh :

Indah Nur Fitrianiingsih

131411016

Telah di pertahankan di depan Dewan Penguji pada hari Selasa, 16 Januari 2018 dan di
nyatakan telah lulus memenuhi syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji I

Dr. H. Awwaluddin Pimay, Lc. M.Ag
NIP. 19610727 200003 1 001

Sekretaris Sidang / Penguji II

Ahmad Fauzi, S.Ag. M.Si.
NIP. 19730808 199703 1 004

Penguji III

Suprihatiningsih, M.Si
NIP. 19760510 200501 2 001

Penguji IV

Abdul Ghoni, M.Ag
NIP. 19770709 200501 1 003

Mengetahui

Pembimbing

Ahmad Fauzi, S.Ag. M.Si.
NIP. 19730808 199703 1 004

Pembimbing II

Drs. Kasmuri, M.Ag
NIP. 19660822 199403 1 003

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tanggal 25 Januari 2018



Dr. H. Awwaluddin Pimay, Lc. M.Ag
NIP. 19610727 200003 1 001

iii

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya | dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 31 Januari 2018



Indah Nur Fitrianingsih

NIM: 131411016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala taufiq dan hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua khususnya penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Berkat ridho Allah SWT dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Strata I (SI) di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo. Dengan segala rendah hati penulisan karya ilmiah yang berjudul “Model Pengembangan Masyarakat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Analisis di Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberi mendukung dan memberi bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin. M, Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ahmad Faqih, S.Ag.,M.Si. selaku wali dosen dan pembimbing I dan Drs. Kasmuri M.Ag selaku pembimbing

II yang dengan telaten dan sabar dalam membimbing penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan ibu dosen, pegawai administrasi dan seluruh karyawan Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo yang telah membantu dan melayani dalam proses administrasi.
5. Ayahhanda Muh Nur dan ibunda Nur Azizah tercinta atas perjuangan dan kasih sayangnya yang selalu mendukung selama menempuh pendidikan di UIN WAalisongo Semarang.
6. Lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Krajankulon yang telah memberikan informasi dan data penelitian.
7. Bapak Syukur, Bapak Solikhun dan Bapak joko selaku fasilitator desa program KOTAKU, yang berkenan memberikan informasi dan data penelitian.
8. Kepala Desa Krajankulon beserta jajarannya yang berkenan memberikan informasi dan data penelitian.
9. Para Penerima Manfaat “Jamban Sehat” serta Relawan di Desa Krajankulon yang berkenan memberikan informasi serta data penelitian.
10. Teman-teman PMI 2013 yang telah menjadi teman bertukar pikiran, saling mendoakan dan memberi cerita indah di PMI UIN Walisongo.

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan mereka, selain hanya dapat berdo'a semoga amal baik yang telah di berikan di balas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Amin

Peneliti menyadari bahwa karya ilmiah ini merupakan karya tulis pemula yang mungkin masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu maka saran dari pihak-pihak terkait sangat penulis harapan. Dengan ucapan alhamdulillahirobbil alamin penulis berharap semoga hasil karya ilmiah ini membawa kemanfaatan bagi keilmuan pengembangan masyarakat islam dan sebagai stimulan bagi penulis untuk menghasilkan karya-karya brikutnya yang lebih baik. Amin.

Semarang, 31 Januari 2018

Penulis

Indah Nur Fitrianingih
NIM: 131411016

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya dan keluarga besar, Ayah, Ibu, dan Nenek yang selalu mendukung dan mendoakan serta teman dan sahabat Hikmahtul Qoidah, Risky Choironi, Afwah Ulya dan Risky Ida Pariyani yang selalu memotivasi dalam proses pengerjaan skripsi.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”.

(QS. AL-INSYIRAH AYAT 6-8)

ABSTRAK

Indah Nur Fitrianingsih, NIM 131411016, Model Pengembangan Masyarakat melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)(Studi Analisis di Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal), yang dilatarbelakangi oleh sistem pembangunan top down yang bersifat sentralisasi, dimana pembangunan di daerah dikendalikan dari pusat dan umumnya dilaksanakan secara sektoral tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan riil yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan pendekatan pembangunan bottom up berbanding terbalik dengan pendekatan top down, karena pendekatan bottom up merupakan pembangunan yang berasal dari masyarakat atau berpusat pada masyarakat. Program KOTAKU mempunyai konsep pembangunan bottom up melalui target program KOTAKU base line 100-0-100. Yang artinya 100% masyarakat mendapatkan sarana air bersih, 0% pengurangan luasan kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak. Kemudian menggunakan konsep model pengembangan masyarakat perencanaan sosial adalah yang dimaksudkan untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu. Proses perencanaan sosial lebih menekankan pada “tujuan tugas”. Pada proses perencanaan partisipatory planning bukan hanya menghasilkan suatu akan tetapi menciptakan ruang dialog antar berbagai pelaku dengan perosalan yang diungkapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan model pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU di Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pengembangan masyarakat islam yang tepat melalui program KOTAKU. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode induktif, metode

induktif adalah metode berfikir dari hal-hal khusus atau kenyataan menuju hal-hal umum atau teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU di Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut: **Pertama**, model pengembangan masyarakat perencanaan sosial dan aksi sosial. **Kedua**, hasil model pengembangan masyarakat adalah sudah sesuai tujuan dari program KOTAKU dan tercapai sesuai target dari program KOTAKU yaitu data base line 100% akses sanitasi yang layak.

Kata Kunci: model, pengembangan, masyarakat, dan program KOTAKU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL, DIAGRAM, GRAFIK, GAMBAR, BAGAN	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Pengembangan Masyarakat	27
1. Pengertian Pengembangan Masyarakat.....	27
2. Tujuan Pengembangan Masyarakat	30
3. Penerima Manfaat Obyek	

(Kelompok Sasaran).....	31
4. Model Pengembangan Masyarakat	32
5. Metode Pengembangan Masyarakat ...	40
B. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).....	62
1. Pengertian Program KOTAKU	63
2. Tujuan Program KOTAKU.....	63
3. Target Program KOTAKU	65
4. Strategi Program KOTAKU	66
5. Prinsip Program KOTAKU.....	67

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI OBJEK PENELITIAN PROGRAM KOTAKU DESA KRAJANKULON

A. Gambaran Umum Desa Krajankulon.....	67
1. Kondisi Geografis	67
2. Kondisi Sosial Budaya	70
3. Kondisi Sanitasi.....	72
4. Kondisi Demografi	73
B. Gambaran Profil BKM ANUGERAH	78
C. Gambaran Umum Program KOTAKU di Desa Kranjankulon	85
1. Proses Program KOTAKU di Desa Krajankulon.....	85
a. Tahap Persiapan.....	86
b. Tahap Perencanaan	103
c. Tahap Pelaksanaan.....	122
2. Hasil Pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Krajankulon.....	131
a. Pengembangan KOTAKU secara fisik	131
b. Pengembangan KOTAKU secara	

non fisik	136
-----------------	-----

**BAB IV : MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT
MELALUI KEGIATAN PROGRAM KOTAKU
DI DESA KRAJANKULON**

A. Analisis Model Pengembangan Masyarakat melalui Program KOTAKU di Desa Krajankulon	141
B. Analisis Hasil Pelaksanaan Model Pengembangan Masyarakat melalui Program KOTAKU di Desa Krajankulon	155

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	160
B. Rekomendasi	163
C. Penutup	164

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS**

DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Nama-Nama Kampung Desa Krajankulon.....	69
TABEL 2	: Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Krajankulon.....	73
TABEL 3	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Krajankulon.....	75
TABEL 4	: Tugas Pokok dan Fungsi BKM.....	81
TABEL 5	: Nama-Nama Relawan BKM ANUGERAH.....	95
TABEL 6	: Nama-Nama Penerima Manfaat Jamban Sehat	132

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 1	: Data Kondisi Sanitasi di Desa Krajankulon.....	72
DIAGRAM 2	: Presentase Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Krajankulon	76
DIAGRAM 3	: Presentase Penduduk Berdasarkan Agama Desa Krajankulon	77
DIAGRAM 4	: Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Krajankulon	78

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Krajankulon	74
-----------------	---	----

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	: Sosialisasi Program KOTAKU	80
GAMBAR 2	: Peta Kondisi Perumahan	122
GAMBAR 3	: Tahap Pelaksanaan	130

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1	: Struktur BKM ANUGERAH	80
----------------	-------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang hingga saat ini masih menjadi negara berkembang, ini dikarenakan sumber daya manusia rendah, ini terlihat dari tingkat masyarakat yang mencari pekerjaan menjadi tenaga kerja indonesia (TKI) di berbagai negara, ini merupakan potret buram dari hasil pembangunan SDM indonesia selain itu berdasarkan kenyataan lemahnya usaha pembinaan dan pembangunan SDM di Indonesia, akibatnya kemampuan dan kemauan dari sumber daya manusia kurang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun keatas, masyarakat yang tidak sekolah ada 5,90, tidak tamat SD ada 12,62, tamat SD 27,79, tamat SMP 21,44 dan tamat SMA ada 32,25.¹ Selain disebabkan oleh faktor di atas, faktor ekonomi juga menjadi penyebab dasar dari ketidakmampuan serta kemauan dari sumber daya manusia untuk mengubah dan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk menciptakan sebuah perubahan maka dibutuhkan suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Banyak program-program pembangunan dicanangkan oleh pemerintah namun program-program tersebut

¹ Data BPS –Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id>

menggunakan model pendekatan dari atas ke bawah (*top down*) seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendekatan pembangunan dari atas ke bawah adalah pembangunan yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pihak di luar masyarakat namun dari pihak pemerintah atau agen pembangunan lainnya, pendekatan *top down* bersifat sentralisasi, dimana pembangunan di daerah dikendalikan dari pusat dan umumnya dilaksanakan secara sektoral, pendekatan pembangunan ini tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat.

sedangkan pendekatan pembangunan dari bawah ke atas berbanding terbalik dengan pendekatan *top down*, karena pendekatan *bottom up* merupakan pembangunan yang berasal dari masyarakat, pendekatan ini didasari pendapat bahwa pembangunan tidak hanya bertujuan untuk social dan ekonomi, tetapi juga masalah demokrasi dan hak asasi manusia. Pendekatan ini berpusat pada masyarakat, pendekatan ini menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan masyarakat setempat.² Pendekatan *top down* seringkali dianggap sebagai pendekatan yang tidak efektif karena adanya asumsi bahwa pemerintah sebagai pencetus sebuah gagasan dan masyarakat harus menerimanya tanpa

² Rislima F. Sitompul , *Merancang Model pengembangan masyarakat Pedesaan dengan Pendekatan System Dynamics* , LIPI Press, Jakarta, 2009, hlm. 21-23

mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Namun berbeda dengan model pendekatan *bottom up*, model pendekatan ini sangat diperlukan dalam proses penanganan program pembangunan untuk masyarakat. Penerapan model pendekatan *bottom up* memberikan sebuah kesempatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk ikut berpartisipasi serta beraspirasi dalam penyelesaian sebuah problem yang ada di masyarakat dengan menggunakan cara-cara pendekatan yang cocok dengan kondisi mereka. Mulai dari mencari penyelesaian problem, perencanaan hingga pelaksanaan maka partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran, pemahaman dan kemauan dari masyarakat, karena masyarakat berperan sebagai subyek dalam sebuah pembangunan.

Bentuk dari sebuah pembangunan adalah pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan sebagai proses membangun relasi atau hubungan sosial baik secara vertikal maupun horizontal³. Artinya bahwa dalam pengembangan masyarakat upaya dari masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, kultur, lingkungan dll. Salah satu bentuk dari pengembangan masyarakat yang dicanangkan pemerintah adalah PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini menjadi tonggak dari bentuk

³ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 32

pengembangan masyarakat yang menekankan partisipasi dari masyarakat. Program PNPM Mandiri Perkotaan selaras dengan program yang ada sekarang yaitu program KOTAKU, rancangan program KOTAKU berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya, program tersebut telah memberikan berbagai pelajaran penting untuk mengembangkan program KOTAKU. Program KOTAKU dicanangkan oleh pemerintah sebagai bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Program KOTAKU berlandaskan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJM 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya mencetuskan pembangunan *platform* kolaborasi melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan

permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).⁴

BKM salah satu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif. BKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi warga desa/kelurahan serta memperjuangkan warga di tingkat kelurahan/desa dalam musbangdes. Selain itu BKM juga sebagai peran utama dalam menjalankan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk masyarakat warga penerima manfaat. Salah satunya adalah BKM ANUGERAH yang ada di Desa Krajankulon, Desa Krajankulon sering masuk dalam desa yang menerima program dari pemerintah mulai dari program PNPM Mandiri Perkotaan, P2KKP hingga saat ini dalam proses melaksanakan program KOTAKU ini dikarenakan Desa Krajankulon merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Desa ini termasuk desa yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi sehingga terbagi dalam 12 RW dan 41 RT dan Desa Krajankulon masuk

⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*, Jakarta, 2016, hlm. 2

dalam wilayah perkotaan lini 1, artinya bahwa Desa Krajankulon termasuk desa yang padat penduduk dan terkumuh di kecamatan kaliwungu. Kemudian yang menjadi prioritas SK kumuh di Desa Krajankulon adalah kebiasaan atau pola hidup masyarakat yang buang air besar (BAB) sembarang baik disungai maupun di semabarang tempat. Oleh karena itu Desa Krajankulon masuk dalam SK kumuh dalam program KOTAKU, ada yang menjadi target dalam program KOTAKU untuk periode 2015-2019 adalah 100-0-100 meliputi :

1. 100 : semua warga harus mendapatkan air bersih 100% mulai tahun 2015-2019
2. 0 : 0% semua rumah harus layak huni
3. 100 : semua masyarakat mendapatkan fasilitas sanitasi MCK 100%⁵

Peran BKM sangat penting dalam proses penguatan perubahan taraf hidup yang lebih baik untuk pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU. KOTAKU sebagai sebuah program yang ditunjukan untuk masyarakat dengan pelaku utamanya adalah masyarakat itu sendiri karena partisipasi dari masyarakat menjadi nilai utama dalam proses pengembangan, kemudian di perkuat lagi oleh keterlibatan dari dan di dampingi oleh fasilitator dari BKM. Salah satu program yang diadakan oleh program KOTAKU yaitu 100% semua

⁵ Wawancara dengan Zumarul Faizin (Koordinator BKM ANUGERAH Desa Krajankulon), Tanggal 1 Juni 2017

masyarakat mendapatkan fasilitas sanitasi MCK (jamban sehat). Sarana fasilitas jamban sehat sangat menunjang bagi kualitas kesehatan masyarakat, sehingga menciptakan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Namun Perilaku Hidup Bersih Sehat belum bisa di terapkan pada masyarakat Desa Krajankulon, dikarenakan berdasarkan hasil survey lapangan, Desa Krajankulon belum memenuhi kebutuhan sanitasinya secara menyeluruh, terdapat beberapa wilayah seperti RW 007 dan RW 006 dan beberapa RW lainnya yang masyarakatnya masih menggunakan sungai dan MCK umum. Penyakit yang di akibatkan oleh perilaku BAB sembarangan meliputi diare dan cacingan. Menurut data kesehatan yang ada di UPTD Puskesmas Kecamatan Kaliwungu mengenai angka penderita penyakit diare, jumlah kasus diare terbanyak di derita oleh anak usia dibawah 15 tahun, umur <1th 5 anak, umur 1-4 th 13 anak, umur 5-14 th 41 anak dan umur >15 th 38 anak.⁶

Sanitasi yang buruk dapat berakibat luas pada rendahnya standar kesehatan masyarakat. Penyakit diare dan cacingan menjadi indikasi buruknya system sanitasi. Berdasarkan data *World Health Organization (WHO)*, penyakit diare di Indonesia telah merenggut sekitar 31.200 nyawa balita setiap tahun. Diare menjadi penyebab utama kematian bayi usia 29 hari hingga 11 bulan sebesar 31,4 persen, dan balita umur 12-59 bulan sebesar 25,2 persen. Menurut para pakar kesehatan, kasus sakit dan kematian akibat diare

⁶ Wawancara dengan Ema Zahro (Kabag Kebidanan UPTD Puskesmas Kaliwungu) Tanggal 19 Mei 2017

sebetulnya bisa dicegah apabila masyarakat mau mengubah perilaku BAB sembarangan. Untuk perubahan ini tentu dibutuhkan kekuatan komitmen pemerintah daerah, yang diaplikasikan pada penerapan kebijaksanaan di masyarakat. Hal ini perlahan akan mengubah kebiasaan masyarakat untuk tidak BAB sembarangan.⁷

Penyebab dari ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada dilingkungan, pada gilirannya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri dan hanya mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Dari paparan diatas cukup jelas menunjukkan bahwa kemiskinan akan tumbuh subur dalam situasi dimana perilaku atau sikap dan cara pandang (paradigma) masyarakat yang belum berdaya. Selain itu, faktor kondisi masyarakat yang terkait satu sama lain dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu bagaimana cara menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dalam segi kesehatan.

Dari paparan diatas jika menengok dari sisi agama, pengembangan masyarakat pada zaman perjuangan Rasulullah SAW selaku dai dan kepala negara Madinah telah berupaya mengembangkan masyarakat kaum muslimin menuju iman dan takwa demi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Pengembangan masyarakat lebih tepat menggunakan bentuk *da'wah bi al-hal*

⁷ Roestanto Wahidin D, *Membangun Perdesaan Modern*, Gajah Hidup, Jakarta, 2015, hlm. 189-190

karena lebih menekankan aspek pelaksanaan suatu program kegiatan. Ini berarti bahwa pengembangan masyarakat berkaitan erat menyangkut perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan. Prinsip pembangunan masyarakat Islam adalah holistik dan mempedulikan semua aspek kehidupan, eksistensi komponen alam termasuk kingkungan bukan hanya manusia. Pengembangan dimaksudkan sebagai upaya merubah masyarakat tradisional, miskin, terbelakang dan tidak beriman menuju masyarakat modern yang maju, kreatif, beriman dan bertakwa.⁸ Namun kenyataan yang ada di lapangan kesehatan fisik masih menjadi masalah karena sebagian masyarakat masih ada yang berperilaku tidak ramah lingkungan, dalam sebuah Al-Qur'an dijelaskan di surat Ar-Rum Ayat 41, yang berbunyi;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).” (QS: Ar-Rum Ayat: 41)⁹

⁸ Kamaluddin. Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam. Dalam Jurnal Konsep Dasar dan Arah Pengembangan. Vol. VIII. No. 02. Juli 2014

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quraan dan Terdjemahnja*, Jakarta, JAMUNU, 1969, hlm. 647.

Pada surat Ar-Rum ayat 41-42 dapat dianalisa bahwa ayat ini mengharapkan seorang muslim dapat menyadari pentingnya menjaga serta melestarikan alam lingkungan, dan juga tidak membuat kerusakan terhadap alam lingkungan. Dengan artian jika akan melakukan sesuatu harus melalui pertimbangan pemikiran yang matang akan akibat yang ditimbulkannya agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merusak lingkungan.

Dari masalah yang diuraikan di atas, maka masalah kegiatan atau program pengentasan masalah pemukiman kumuh untuk kategori masyarakat golongan menengah kebawah, oleh pemerintah melalui KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Desa Krajangkulon. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan tujuan terciptanya permukiman yang layak huni sesuai target nasional 0 ha permukiman kumuh pada 5 tahun mendatang (2019) serta menghindari berbagai penyakit dan kerusakan lingkungan. Maka untuk menciptakan kondisi yang ideal seperti itu, diperlukan kesadaran penuh dari masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah ataupun BAB disungai-sungai dan tempat lainnya. Agar sungai bersih dan lingkungan sekitar bersih sehingga tercipta lingkungan yang

sehat, bersih dan nyaman bagi masyarakat Desa Krajan Kulon, Kaliwungu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU di Desa Krajankulon?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan model pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU di Desa Krajankulon?

C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mendiskripsikan mengenai proses model pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU di Desa Krajankulon.
2. Bertujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan model pengembangan masyarakat melalui profram KOTAKU di Desa Krajankulon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi yang berkaitan dengan model pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU, serta mengenai proses penggunaan model yang di pakai dalam bidang pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU.

2. Manfaat Praktis

Dengan mengetahui hasil dari pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU, diharapkan Agar terjadi proses pembelajaran membangun lingkungan yang bersih serta terjaga kesehatan dari masyarakatnya. Kemudian meningkatkan mutu kesejahteraan bagi warga miskin penerima manfaat kegiatan tersebut, supaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, Dedi Rianto Rahadi (2015), dalam jurnal “Model Pengembangan Kampung sebagai Desa Inovatif (Studi Kasus Kota Palembang)”. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model kampung sebagai desa inovatif, Obyek penelitian di kota Palembang dan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dibutuhkan model pengembangan desa inovatif dengan pendekatan keunggulan kompetitif masing-masing disetiap desa yang ada di kota Palembang. Kemiskinan sulit untuk dihilangkan tetapi dengan mengedapankan keunggulan masing-masing setiap kepala keluarga diharapkan masyarakat menjadi mandiri. Desa inovatif di kota Palembang dikembangkan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu Kecamatan Seberang Ulu I dengan model keterlibatan semua unsur terkait antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Kedua, Andi Maya Purnamasari (2011), dalam jurnal *Perencanaan Wilayah dan Kota*, dengan judul “Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan” Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Toddabojo melalui konsep pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Dengan produk wisata yang ditawarkan, maka arahan yang paling tepat adalah mengangkat karakter asli Kampung Toddabojo dalam strategi pengembangan produk wisatanya, dan kemudian disusun kerangka pengembangannya, sehingga kegiatan pariwisata di Kampung Toddabojo dapat menjadi bentuk pariwisata yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini mengangkat karakter asli Kampung Toddabojo dalam strategi pengembangan produk wisatanya, dan kemudian disusun kerangka pengembangannya berdasarkan produk wisatanya, sehingga kegiatan pariwisata di Kampung Toddabojo dapat menjadi bentuk pariwisata yang berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut peningkatan kualitas masyarakat harus menjadi perhatian utama, misalnya dengan melakukan pelatihan atau penyuluhan tentang cara menghasilkan nilai tambah dari produk pertanian dan peternakan, serta pelatihan terkait pengembangan pariwisata sehingga pada akhirnya mampu menciptakan produk produk kepariwisataan yang

mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar internasional.¹⁰

Ketiga, Ardhana Januar Mahardhani (2010), dalam jurnal Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu yang berjudul “Pengembangan Masyarakat Pesisir Di Tulungagung”. Tujuan penelitian ini akan menguraikan permasalahan masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Tulungagung, melihat bagaimana keadaan yang ada dan apa saja peran yang telah diambil oleh pemerintah daerah mengatasi permasalahan yang ada. Desain penelitian menggunakan kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian diketahui jika masyarakat Desa Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban yang ada di sekitar pesisir hidup dengan sangat terbatas, pemerintah daerah tidak begitu mengambil perannya dalam rangka memberikan kekuatan kepada masyarakat guna mengembangkan ekonomi lokal. Hasil penelitian diketahui jika masyarakat Desa Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban yang ada di sekitar pesisir hidup dengan sangat terbatas, pemerintah daerah tidak begitu

¹⁰ Andi Maya Purnamasari. “Pengembangan masyarakat untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan”. dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 22. No. 01. April 2011. Hlm. 49

mengambil perannya dalam rangka memberikan kekuatan kepada masyarakat guna mengembangkan ekonomi lokal.¹¹

Keempat, Muhtar (2012), dalam jurnal “Pengembangan Masyarakat dengan Memanfaatkan Aset Lokal” ini bertujuan mengembangkan aset lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakatsekitar hutan. Pendekatan penelitian ini kualitatif (*action research*). Hasil penelitian menunjukkan: (masyarakat) kelompok yang tergabung pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)-Mlatirejo telah dapat mengembangkan pengolahan sumberdaya lokal: pembuatan criping pisang, ubi jalar, dan talas melalui teknologi sederhana. Yang belum dilakukan adalah pembuatan kompos dari kotoran ternak sapi/ kambing. Kelompok tersebut juga telah dapat melakukan aksi sosial: santunan anak yatim/piatu, pertemuan kelompok per-selapanan (35 hari) dan pencatatan atas kegiatan yang dilakukan/pengadministrasian, serta sekaligus penghimpunan dana dari oleh dan untuk anggota (masyarakat). Sementara itu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)-Sendangmulyo juga telah dapat melakukan pembuatan criping gadung dan pisang. Seperti pada Gapoktan, pembuatan kompos juga belum dapat dilakukan yang sebenarnya telah mendapat

¹¹ Ardhana Januar Mahardhani. “Pengembangan Masyarakat Pesisir Di Tulung Agung” dalam *jurnal Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*. ISBN 978-979-3649-81-8. 2010

pesanan dari calon pengguna sekitar dua ton-an (menunggu musim hujan). Kegiatan sosial yang dilakukan antara lain mengantar berobat seorang warga yang stress (ke Rumah Sakit JiwaSolo), pertemuan kelompok sebulan sekali, dan melakukan pencatatan terhadap kegiatan yang dilakukan¹²

Kelima, Afia E P Tahoba (2011) dalam jurnalnya “Strategi Komunikasi Dalam Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)” Kasus Program *Community Development* Pada Komunitas Adat Terkena Dampak Langsung Proyek LNG Tangguh Di Sekitar Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua BaratTujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kemacetan dalam proses komunikasi berdasarkan unsur komunikasi, serta merancang strategi komunikasi dalam program *community development*. Penelitian ini dianalisa secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara perorangan, dan *focus group discussion* dan *depth interview* dengan tokoh masyarakat adat, aparat desa dan bagian internal perusahaan. Strategi komunikasi pembangunan dalam program pengembangan masyarakat (*community development*) pada komunitas adat di daerah sekitar Teluk Bintuni adalah peningkatan kesadaran partisipasi pembangunan dengan melakukan pendekatan persuasif melibatkan peran serta tokoh adat, memberikan undangan atau

¹² Muhtar, Pengembangan. “Masyarakat dengan Memanfaatkan Aset Lokal”. Dalam *Jurnal SosioKonsepsia*. Vol. 17. No. 01. 2012.

jadwal pertemuan secara langsung sehingga masyarakat merasa dihargai atau merasa dibutuhkan dalam proses komunikasi, menciptakan iklim komunikasi yang dapat merangsang para partisipan berani mengeluarkan pendapat atau ide pembangunan dengan memanfaatkan saluran komunikasi tradisional yang berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat yaitu acara *gelar tikar adat* serta mengembangkan komunikasi partisipatoris dalam komunikasi kelompok. Hasil dari penelitian ini adalah Strategi komunikasi pembangunan dalam program pengembangan masyarakat (*community development*) pada komunitas masyarakat adat di daerah sekitar Teluk Bintuni adalah mendesain pesan komunikasi yang dapat menciptakan kemandirian, peningkatan kesadaran partisipasi pembangunan, dengan melakukan pendekatan persuasif melibatkan peran serta tokoh adat, menciptakan iklim komunikasi yang dapat merangsang para partisipan berani mengeluarkan pendapat atau ide pembangunan dan memanfaatkan saluran komunikasi tradisional yang berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat yaitu acara *gelar tikar adat* serta mengembangkan komunikasi partisipatoris dalam kelompok masyarakat.

Penelitian di atas terdapat kesamaan kajian tentang pengembangan masyarakat, namun obyek dan model serta metode yang digunakan berbeda. Pada penelitaian ini akan mengkaji tentang “ Model Pengembangan Masyarakat Melalui

Program KOTAKU (Studi Analisis di Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Penelitian ini belum ada yang membahas dan sejauh dari penelusuran peneliti, belum ada penyusun yang membahas tentang penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya digunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari fenomena untuk menentukan hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain.¹³ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan

¹³ Sofar Silaen, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: IN Media, 2013), hlm. 19.

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁴

2) Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi untuk mencari dan mengumpulkan data yang kemudian akan diolah untuk mendeskripsikan tentang model pengembangan masyarakat yang digunakan dalam proses pelaksanaan program KOTAKU serta kebiasaan buruk atau PHBS dari masyarakat yang belum mempunyai fasilitas MCK di rumah dan berakibat buruk di lingkungan sekitar atau pencemaran lingkungan, dengan istilah lain, yaitu menggunakan data primer.

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio tape, pengambilan foto dan film (Moleong, 2007:157). Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan, dan observasi (pengamatan). Sumber data primer pada penelitian ini adalah melalui pengamatan secara langsung di lingkungan Desa

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, ALFABETA, 2014. Hlm. 41

Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu dan dengan melalui wawancara kepada masyarakat yang belum mempunyai fasilitas MCK, Fasilitator KOTAKU, dan kepada anggota BKM yang menangani program KOTAKU disesuaikan dengan target data base line 100% akses sanitasi atau “Jamban Sehat” melalui KOTAKU. Sedangkan untuk data tambahan, peneliti mencari dan mendokumentasikan berbagai data dari sumber lain guna memperkaya data, baik itu melalui buku, foto dan lain sebagainya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012:224). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :

a) Observasi

Sutrisno Hadi (1986) berpendapat bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi dapat digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya

mengamati secara langsung keadaan obyek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut terlibat langsung.

Beberapa hal yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini, diantaranya mencakup keadaan geografis dan kehidupan sosial warga Desa Krajan Kulon Kecamatan. Kaliwungu, serta kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.

b) Wawancara

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara secara umum terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara. Maka sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan. Namun, pada pelaksanaannya nanti akan disesuaikan dengan keadaan responden.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang memiliki arti barang-barang tertulis (Arikunto, 2002:135). Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini pendukung data dalam hal tertulis atau dokumen diambil dari berbagai arsip-arsip, serta juga melalui foto.

4) Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode analisis deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif atau berdasarkan fakta-fakta

¹⁵ *Ibid*,.hlm 57

yang ditemukan dilapangan kemudian dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori.¹⁶

a. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, focus pada hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap ini penulis merekap hasil wawancara selanjutnya peneliti pilah sesuai dengan model pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU di Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka selanjutnya dengan mendisplaykan data. Penyajiannya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.¹⁷ Dengan ini maka akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan proses selanjutnya berdasarkan apa

¹⁶ Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, dalam *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol.5, No.9, Januari-Juni, 2009, hlm. 1-8.

¹⁷ Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 139.

yang telah dipahami. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan model pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU.

c. *Conclusion Drawing*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁸ Pada tahap ini penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan model pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU di Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

5) Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data merupakan pengukuran sesuatu (dimensi dari satu variabel) secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi) dapat

¹⁸ Sugiyono, *Op.Cit.*, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 252.

diartikan sebagai kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur sehingga hasil ukur yang didapat akan mewakili dimensi ukuran yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan¹⁹, dan uji komfirmabilitas (obyektivitas). Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data melalui hasil wawancara dan observasi dari berbagai sumber informan, selain itu sumber data dari arsip dan dokumentasi

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan suatu penelitian diperlukan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian, langkah-langkah penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini terdiri atas enam sub bab antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian pembahasan bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama yaitu teori mengenai pengembangan masyarakat dan sub bab kedua yaitu pedoman dari program KOTAKU

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, 2012, hlm. 184

- BAB III : Gambaran umum mengenai profil Desa Krajangkulon dan Model pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU, yang meliputi: Profil KOTAKU, Proses Pengembangan Masyarakat melalui program KOTAKU, dan Hasil Pengembangan Masyarakat melalui program KOTAKU.
- BAB IV : Bab ini menganalisa dua sub, yaitu menganalisa tentang program dari kotakku melalui model pengembangan masyarakat dan menganalisa mengenai hasil penelitian model pengembangan masyarakat melalui program KOTAKU .
- BAB V : Bab ini terdiri atas kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengembangan Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Sebagaimana asal dari katanya, pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep “pengembangan” dan “masyarakat”, sedangkan pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹

Pengembangan masyarakat juga dapat diartikan sebagai sebuah metode yang digunakan untuk seseorang supaya meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses kehidupan.

Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses dari usaha masyarakat itu sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dll serta mendorong kontribusi dari masyarakat yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip

¹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 33

keadilan sosial dan saling menghargai.² Artinya bahwa dalam proses pengembangan masyarakat melibatkan partisipasi dari masyarakat tanpa memandang dari latarbelakangnya.

Christenson dan Rombinson menyatakan bahwa community development intervensi bukanlah merupakan hal yang mutlak justru yang lebih penting adalah prakarsa dan partisipasi dari masyarakat yang di butuhkan dalam sebuah proses.³

Dengan demikian melalui community development sebagai proses untuk meningkatkan kondisi kehidupan yang memberikan focus perhatian pada komunitas sebagai suatu kesatuan kehidupan bermasyarakat, guna merealisasikan tujuan tersebut cenderung lebih mengandalkan pada pemanfaatan dan pendayagunaan energi yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam perkembangannya, konsep community development dapat dilihat dalam beberapa pandangan, seperti pendapat dari Sandres bahwa community development dapat dilihat sebagai suatu proses, karena

² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 4.

³ Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan masyarakat*, Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2013, hlm. 81

aktivitas community development bergerak dari satu tahap ke tahap atau kondisi berikutnya. Sedangkan pandangan Biddle, proses community development tersebut bergerak kearah suatu tahap atau kondisi dimana masyarakat menjadi semakin kompeten terhadap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungan, karena melalui community development diharapkan masyarakat lebih mempunyai komitmen terhadap kondisi kehidupannya, sehingga kemudian bergerak untuk melakukan upaya perubahan dan perbaikan.⁴

Community development merupakan salah satu program pembangunan yang berorientasi pada rakyat. *Community development* pada garis besarnya dapat ditinjau dalam dua pengertian. Pertama, dalam arti luas bermakna sebagai perubahan sosial terencana dengan sasaran perbaikan dan peningkatan bidang ekonomi dan sosial. Kedua, dalam arti sempit adalah perubahan sosial terencana di lokasi tertentu dusun, kampung, desa, kota kecil dan kota besar, dikaitkan dengan proyek yang berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan lokal, sepanjang mampu dikelola sendiri dan dengan bantuan sementara dari pihak luar.

⁴ *Ibid.*, hlm. 95

2. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur Negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite professional dan sebagainya yang kurang berperikemanusiaan dan sulit diakses.⁵

Adapun tujuan umum dari pengembangan masyarakat untuk dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan secara berkelanjutan dalam kegiatan pengembangan masyarakat, tujuan tersebut antara lain:

- a) Mengentaskan masyarakat dari segi kemiskinan kultural dan kemiskinan absolut
- b) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan
- c) Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya
- d) Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata

⁵ Jim Ife, Frank Tesoriero, *Community Develoment*, Yogyakarta, Putaka Pelajar, 2008, hlm. 409

- e) Meningkatkan kesempatan wajib belajar Sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota
- f) Melepaskan masyarakat dari belenggu *ketunaan*, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberdayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- h) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.⁶

Pengembangan masyarakat ini mempunyai empat tujuan, yaitu:

- (1) Menimbulkan percaya kepada diri sendiri,
- (2) Menimbulkan rasa bangga, semangat, dan gairah kerja,
- (3) Meningkatkan dinamika untuk membangun, dan
- (4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

3. Penerimaan Manfaat Obyek (Kelompok Sasaran)

Dalam Pemberdayaan masyarakat selalu ada yang disebut adanya kelompok sasaran atau obyek pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat, utamanya

⁶ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 36-37

⁷ Ardhana Januar Mahardani, “ *Pengembangan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Tulungagung*”, dalam *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, hlm. 2

masyarakat kelas bawah (masyarakat yang termarjinalkan)

Dalam pengertian “penerima manfaat” tersebut terkandung makna bahwa penerima manfaat bukanlah obyek atau “sasaran tembak” yang layak dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan fasilitator, melainkan di tempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani atau di fasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan program pembangunan.

4. Model dalam Pengembangan Masyarakat

a) Pengertian Model Pengembangan Masyarakat

Secara umum model diartikan sebagai kerangka konseptual yang di gunakan sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan.⁸

Model merupakan representasi simbolik dari suatu benda, proses sistem, atau gagasan. Menurut Aubrey Fisher, mengatakan bahwa model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model.⁹ Jadi dapat simpulkan bahwa model merupakan suatu pola

⁸ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Bandung, PT Remaja rosdakarya, 2013, hlm 13.

⁹ <http://bafeto.blogspot.co.id/2012/12/11/perbedaan-dan-persamaan-model-dan-teori/.html>

yang menggambarkan suatu fenomena dengan menggunakan sistem atau gagasan secara sederhana.

Menurut Todaro P.M (1986) bahwa ada 3 komponen dasar suatu model yakni simplifikasi/ penyederhanaan dari suatu fenomena/realitas, hubungan antar variabel-variabel tertentu yang berkaitan satu sama lain dalam menerangkan suatu masalah/ fenomena tertentu, pola atau strategi untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan holistik.¹⁰ Sedangkan model pengembangan masyarakat itu pola atau strategi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah melalui keterlibatan partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha untuk memperbaiki taraf hidup mereka sesuai kekuatan dan prakarsa sendiri.

b) Macam-macam Model Pengembangan Masyarakat

Rothman menyatakan ada tiga klasifikasi dalam pengembangan masyarakat: (1) pembangunan lokalitas, (2) perencanaan social, (3) aksi social :

- 1) pengembangan masyarakat lokal merupakan proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial serta ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif anggota masyarakat itu sendiri.

¹⁰ Agus Sjaafari, Model Pembangunan Masyarakat

Proses yang dilakukan dalam pengembangan masyarakat lokal tidak terlepas dari adanya peran dari pekerja sosial yang mana perannya membantu untuk meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan.

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Model pengembangan lokal sejalan dengan pemberdayaan masyarakat yang berasumsi perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan melalui partisipatif aktif masyarakat lokal, pengembangan potensi dan sumber daya lokal, berupaya menumbuhkan motivasi, perencanaan, dan tindakan melalui partisipasi warga masyarakat setempat. Menurut Rogers (1999) menguraikan lima tahapan adopsi inovasi sebagai model perubahan perilaku komunitas yaitu: (1) tahap pengetahuan, terjadi ketika individu memperoleh inovasi dan beberapa pengertian keuntungan dari kegunaan, (2) tahap persuasi, terjadi ketika individu membentuk sikap menguntungkan atau tidak

menguntungkan terhadap inovasi, (3) tahapan keputusan, terjadi ketika individu menggunakan kegiatan yang mengarahkan untuk memilih, menerima atau menolak inovasi, (4) tahap implementasi, terjadi ketika individu mengambil inovasi untuk digunakan, (5) tahap penegasan, terjadi ketika individu meminta penguatan dari keputusan inovasi yang dibuat.¹¹

2) Perencanaan Sosial

Model perencanaan sosial merupakan proses pragmatis dalam menentukan keputusan dan menetapkan tindakan untuk memecahkan masalah sosial seperti salah satunya masalah kesehatan masyarakat yang buruk. Proses perencanaan sosial lebih menekankan pada “tujuan tugas”. peran pekerja sosial sebagai perencana sosial yang memandang bahwa masyarakat sebagai konsumen atau penerima layanan.

Dalam perencanaan social terdapat *Participatory Planning*, *participatory planning* dipandang sebagai suatu “Proses sosial yang

¹¹ Endang Sutisna, dkk, “Aplikasi Model *Precede-Proceed* pada Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Berbasis Penilaian Kebutuhan Kesehatan Masyarakat”, dalam *Jurnal Kedokteran Yasri*. Vol.23, No. 3, Tahun 2015, hlm. 162

dinegosiasikan”. Bagi de Roux fokus utama *Participatory Planning* bukan menghasilkan suatu rencana, akan tetapi menciptakan ruang dialog antara berbagai pelaku dengan berbagai harapan atau tujuan yang hendak di capai, persepsi dan interpretasi berkenaan dengan persoalan dan isu yang diungkapkan dan dirundingkan.¹² Dalam proses perencanaan social sosial masyarakat perlu ikut serta untuk memudahkan analisis kolektif tentang persoalan masyarakat dan mencapai prioritas berdasarkan kesepakatan bersama. Perencanaan perlu difahami sebagai bersifat berhati-hati, iteratif, dan fleksibel. Perencanaan juga menawarkan suatu kesempatan unik bagi teknisi dan anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menghubungkan pengetahuan.

Dalam konsep perencanaan adalah suatu cara bertindak yang dipilih, setelah pembicaraan. Dalam perencanaan, percakapan memainkan peran sebagai politik dan teknik. Tindakan perencana tidak hanya teknis, tetapi juga komunikatif, mereka membentuk kepedulian dan harapan-harapan (Forester, 1980). Dalam pendekatan Tindakan Komunikatif

¹² Dewi Sawitri, “Profesi Perencanaan Dalam Perencanaan Partisipatif Suatu Kajian Teori dan Praktek Perencanaan”, dalam *Jurnal Kesehatan* , No 23 a, Juni 2004, hlm. 22-23

(*Communicative Action*), perencanaan dipandang sebagai kegiatan yang bersifat interpretasi, komunikasi dan menggambarkan para perencana dalam jalinan komunitas, politik, dan pembuatan keputusan public (Brooks, 2002).

Mengacu pada pendekatan di atas, pengetahuan untuk bertindak, prinsip-prinsip bertindak, dan cara bertindak secara aktif dihasilkan oleh anggota suatu masyarakat yang berkomunikasi satu dengan lainnya, dalam waktu dan tempat yang khusus, dengan kata lain masyarakat mempunyai kedudukan dan fungsi utama dalam keseluruhan proses perencanaan ini. Peranan perencana adalah sebagai fasilitator untuk menampung pembicaraan yang terjadi dan menjamin bahwa kaum marginalis juga mendapat kesempatan untuk didengar suaranya.¹³

3) Aksi sosial

Sasaran dari aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan serta struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan dan pengambilan keputusan. Aksi sosial lebih menekankan pada tujuan proses dan tujuan hasil melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan

¹³ Ibid., hlm 24

tindakan-tindakan actual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemertaan dan keadilan.¹⁴

Banyak teori aksi social yang berbeda dalam hal pendekatannya. Pendekatan yang dimulai dari individu dan hubungannya dalam kelompok, adapula teori yang menekankan pada kesukarelaan. Menurut Herbert Thelen mengemukakan ada Sembilan langkah dalam mengimplementasikan ide seseorang untuk menjadi program komunitas antara lain:

- a. Adanya ide dari seseorang
- b. Adanya pengarahan/ kepemimpinan
- c. Melakukan kontak ke masyarakat
- d. Membuat perencanaan program
- e. Melakukan tahap awal aksi
- f. Mengadakan opini public
- g. Melakukan kerjasama dengan kelompok lain
- h. Menyebarkan program ke seluruh jaringan masyarakat

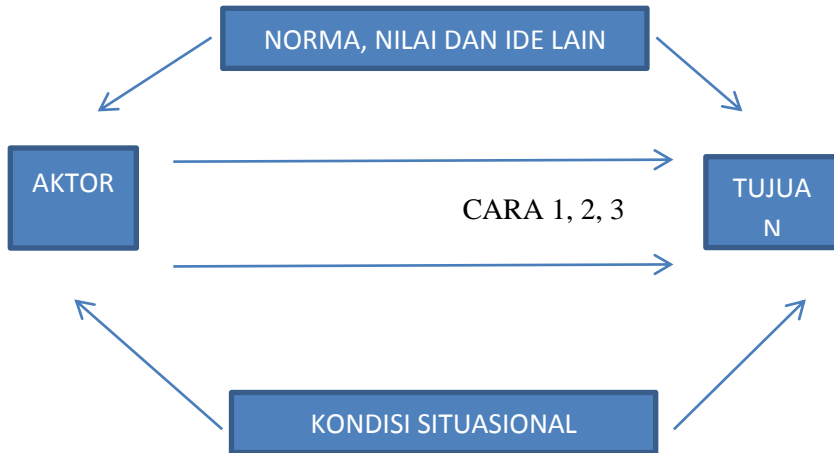
Teori ini menekankan pada pentingnya individu yang memulai suatu pekerjaan perbaikan dikenaal dengan teori aksi nuklir. Teori aksi social yang menekankan pada kesukarelaan dikembangkan

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm. 42-44

oleh Parson. Menurut Parson kesukarelaan ialah basis bagi pembuatan keputusan yang subyektif pada setiap individu actor, tetapi keputusan-keputusan itu dipengaruhi oleh hambatan-hambatan normative dan situasional. Tahap dari aksi social di sesuaikan dengan perkembangan konsep-konsep berikut ini :

- a) Aksi tidak terjadi dalam suatu situasi social yang vakum.
- b) Aksi terjadi dalam suatu konteks social. Actor memiliki suatu status dan memainkan suatu peranan, yang ditentukan secara normatif.
- c) Dalam berbagai system, status peranan tidaklah terpisah, tetapi berhubungan satu sama lain.
- d) Unit aksi harus dilihat dari perspektif system interaksi. Aksi dalam hal ini dapat dilihat sebagai pola pelaksanaan suatu peranan oleh seorang actor.
- e) Suatu system social ialah system interaksi yang melibatkan banyak actor, yang menduduki berbagai status-posisi dan menjalankan berbagai macam peranan yang telah ditentukan secara normatif.
- f) System interaksi diwarnai oleh personalitas para aktornya. Dalam hal ini, personalitas ialah saling berhubungan dengan kebutuhan dan kapasitas

pembuatan keputusan oleh aktor-aktor yang memainkan peranan dalam system social.¹⁵



5. Metode Pengembangan Masyarakat¹⁶

1. RRA (Rapid Rural Appraisal)

RRA merupakan sebuah metode penilaian keadaan desa secara cepat, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” bisa dengan sedikit melibatkan masyarakat setempat atau bahkan tidak melibatkan siapapun. Metode RRA dipandang lebih efektif dan efisien dari pada tehnik yang lain.

¹⁵ Anna Fatchlya”*Model Aksi Sosial pada Masyarakat Petambak di Wilayah Pesisir Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi*”, dalam *Jurnal Buletin Ekonomi Perikanan*, Vol. VIII. No. 2, Tahun 2008, hlm. 5-6

¹⁶ Totok, Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, ALFABETA, 2013, hlm. 199

Sebagai suatu teknik penilaian, RRA mengabungkan beberapa teknik antara lain:

- a) Review/ telaah data sekunder, ini termasuk pengamatan peta wilayah dan pengamatan lapangan.
- b) Observasi atau pengamatan lapangan secara langsung.
- c) Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya.
- d) Pemetaan dan pembuatan grafik atau diagram.
- e) Studi kasus, sejarah dan biografi.
- f) Pembuatan kuesioner sederhana dan singkat
- g) Pembuatan laporan lapangan secara cepat.¹⁷

2. PRA (Participatory Rapid Appraisal) atau Penilaian Desa secara Partisipatif

a. Pengertian Participatory Rapid Appraisal

PRA adalah merupakan pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa serta membuat rencana dan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 197-204.

tindakan secara partisipatif (Chambers dalam Djohani, Rianingsih, 1996).¹⁸

PRA merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif, yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan. Melalui PRA, dilakukan kegiatan-kegiatan pemetaan wilayah, analisis keadaan, pemilihan alternatif pemecahan masalah dan rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari para pihak. Dalam metode PRA keterlibatan dari masyarakat sangat di perlukan, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka bisa memudahkan untuk membuat perencanaan penyelesaian suatu masalah.

b. Tujuan Penerapan PRA

Tujuan penerapan metode/pendekatan PRA adalah untuk memberikan dukungan yang efektif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan serta berbasis konteks lokal. Dalam konteks

¹⁸Asep Supriatna, “*Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Desa*”, dalam *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, Vol. 1, No.1, Jan-Mar 2014, hlm. 40

UU Desa maka PRA dapat memberikan pemahaman kepada para aparatur pemerintahan desa dalam melakukan proses identifikasi potensi dan permasalahan yang ada di desanya.¹⁹

c. Prinsip Dasar PRA

Rochdyanto menjelaskan bahwa beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam metode PRA antara lain adalah:

- a. Saling belajar dan berbagi pengalaman,
- b. Keterlibatan semua anggota kelompok,
- c. Orang luar sebagai fasilitator,
- d. Penerapan konsep triangulasi (multidisipliner tim PRA, variasi teknik dan keragaman narasumber)
- e. Orientasi praktis dan keberlanjutan program

d. Siklus dan Tahapan Pendekatan PRA

Dari berbagai sumber disimpulkan bahwa siklus pendekatan PRA adalah sebagai berikut
:

²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 41

²⁰ *Ibid.*, hlm. 42-43

- a. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi wilayah pedesaan secara umum.
- b. Perumusan masalah dan penetapan prioritas masalah;
- c. Identifikasi alternatif pemecahan masalah;
- d. Pemilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia;
- e. Perencanaan penerapan gagasan;
- f. Penyajian rencana kegiatan guna mendapatkan masukan dan penyempurnaan di tingkat yang lebih besar;
- g. Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat;
- h. Pemantauan dan pengarahan;
- i. Evaluasi dan rencana tindak lanjut

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan PRA yang disarikan dari berbagai sumber bacaan dan berdasarkan pengalaman penulis sendiri secara ringkas adalah sebagai berikut :

- a. Penelusuran kondisi wilayah desa dari masa ke masa,
 - b. Pencatatan kalender musiman berdasarkan kebiasaan warga,
 - c. Gambaran pemetaan wilayah
 - d. Penelusuran lokasi (Transect),
 - e. Pembuatan Diagram Venn (bagan hubungan kelembagaan)
 - f. Kajian mata pencaharian warga desa,
 - g. Pembuatan Matriks Ranking (bagan peringkat),
 - h. Penyusunan Rencana Kegiatan Spesifik Lokasi
- e. Implementasi Pendekatan (PRA)
- a. Penelusuran Kondisi Wilayah Desa dari Masa ke Masa
- Penelusuran kondisi wilayah desa dari masa ke masa dilakukan untuk mengungkap kembali apa saja yang telah terjadi atau dialami di wilayah desa tersebut. Hal ini dapat diperoleh dengan mewawancarai salah seorang atau beberapa tokoh masyarakat senior untuk menanyakan apa-apa saja yang masih

dapat diingat, sekaligus menceritakan kondisi saat ini.

Informasi yang diharapkan akan diperoleh dari hasil wawancara itu antara lain tentang:²¹

1. Sejarah terbentuknya kampung atau desa, nama desa dan asal-usul penduduknya,
2. Keberadaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di desa tersebut,
3. Perubahan status kepemilikan dan pemanfaatan lahan,
4. Aktivitas warga dalam pembangunan dan penerapan teknologi baru,
5. Pengalaman warga tentang terjadinya wabah penyakit,
6. Masalah-masalah yang dihadapi dan cara warga desa dalam mengatasinya,
7. Sejarah dan struktur organisasi pemerintahan desa,

Manfaat penelusuran kondisi wilayah desa dari masa ke masa ini adalah

²¹ *Ibid.*, hlm. 41-42

untuk melihat sisi baik dan buruk atas pemanfaatan potensi yang dimiliki, pengalaman keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sumberdaya. Selanjutnya informasi itu digunakan sebagai sumber inspirasi untuk bergerak ke depan secara lebih maju dan lebih baik.

b. Pencatatan Kalender Musiman
Berdasarkan Kebiasaan Warga

Pencatatan kalender musiman berdasarkan kebiasaan warga merupakan pengkajian tentang kegiatan/keadaan masyarakat yang bersifat teknis, sosial, ekonomi dan aspek lainnya yang terjadi berulang-ulang dalam suatu kurun waktu tertentu (musiman), sehingga dapat menggambarkan pola kejadian atau kegiatan pada setiap musimnya atau setiap tahunnya. Misalnya agenda hari besar keagamaan, saat-saat rawan serangan wabah penyakit dan sebagainya.

Manfaat pencatatan kalender musiman berdasarkan kebiasaan warga adalah untuk mendapatkan informasi

mengenai kebiasaan warga dalam memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada serta diharapkan dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan berdasarkan pengalaman dari musim ke musim. Penulisannya dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom kegiatan atau kejadian, waktu dan keterangan.

c. Gambaran Pemetaan Wilayah Desa ²²

Gambaran Pemetaan Wilayah Desa pada pendekatan PRA digunakan untuk memahami keadaan wilayah desa tersebut beserta lingkungannya dalam bentuk gambar peta atau sketsa desa yang meliputi keadaan sumberdaya umum desa, peta penyebaran penduduk, peta pemanfaatan lahan dan sebagainya dengan memanfaatkan peralatan dan bahan seadanya yang dilengkapi dengan keterangan kode atau simbol-simbol tertentu. Dengan dibuatnya Gambaran Pemetaan Wilayah Desa ini, akan

²² *Ibid.*, hlm. 43

diperoleh informasi mengenai potensi sumber daya yang dimiliki, letak geografis sumber daya, batas-batas administrasi desa dan wilayah yang bermasalah.

d. Penelusuran Lokasi (Transect)

Dalam pendekatan PRA, penelusuran lokasi (*transect*) sangat penting untuk melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan dan sumberdaya masyarakat, dengan cara melakukan perjalanan bersama menelusuri wilayah desa. Melakukan transect diawali dari lokasi dengan titik dengan ketinggian terendah menuju ke titik tertinggi di desa yang diamati atau disesuaikan dengan kesepakatan.

Hasil penelusuran lokasi selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah bagan yang disebut Bagan Transect yang berupa gambar irisan lahan yang dilalui, sekaligus menggambarkan ketinggian lokasi dan aktivitas perekonomian masyarakat pada berbagai ketinggian tersebut. Data-data yang dicatat antara

lain: ketinggian lokasi, sumber daya alam, obyek-objek penting, permasalahan yang dihadapi masyarakat dan lingkungan, kondisi teknis, social, dan perekonomian masyarakat, keadaan sarana dan prasarana umum dan sebagainya.

e. *Pembuatan Venn Diagram*

Venn Diagram (bagan hubungan kelembagaan) merupakan teknik yang digunakan dalam pendekatan PRA untuk melakukan kajian hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang terdapat di sekitarnya. Ukuran dan jarak bulatan *Diagram Venn* menunjukkan besar kecilnya manfaat, pengaruh dan kedekatan hubungan suatu lembaga dengan masyarakat. Manfaat pembuatan diagram venn adalah untuk memahami cara masyarakat membuat urutan prioritas pemanfaatan lembaga yang ada. Gambaran selengkapnya bisa dilihat pada lampiran.²³

f. *Kajian Mata Pencarian Warga Desa*

²³ *Ibid.*, hlm 44.

Kajian mata pencaharian warga desa dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis mata pencaharian yang dilakukan warga desa, pola penyebarannya, prospek dan hambatannya serta kemitraan-kemitraan ekonomi yang terjalin di dalamnya. Selain jenis mata pencaharian yang diambil datanya, juga data pergeseran minat warga terhadap jenis mata pencaharian tertentu, aspek-aspek pendukung perekonomian warga, ketersediaan dan keadaan bahan baku untuk usaha, ketersediaan dan keadaan tenaga kerja, keterlibatan laki-laki dan perempuan pada mata pencaharian tertentu serta pendapatan masyarakatnya. Untuk mendapatkan data primer dari pelaku usaha, tentunya perlu disediakan terlebih dahulu instrument pengumpulan datanya berupa kuesioner atau pedoman wawancara. Melengkapi data mata pencaharian, berikutnya dapat dilanjutkan dengan penyusunan Bagan Arus Masukan dan Keluaran, bagan ini biasa digunakan

dalam pendekatan PRA untuk mengkaji dan menggambarkan sistem-sistem yang ada di tengah masyarakat desa, sehingga tergambaran masukan (*input*) dan keluaran (*otput*) serta hubungan antara bagian-bagian dalam sistem itu, misalnya: sistem pengelolaan perekonomian desa, sistem pemanfaatan waktu harian oleh keluarga, sistem pengelolaan usaha rumah tangga, sistem pemasaran produk dan sebagainya.

g. Pembuatan Matriks Ranking (Bagan Peringkat)

Pembuatan matriks ranking (bagan peringkat) dilakukan untuk mempertajam hasil kajian-kajian sebelumnya dengan penerapan teknik komparasi menggunakan skala Likert. Matriks itu disajikan pada sebuah tabel dengan criteria tertentu, misalnya pertimbangan keseriusan permasalahan, manfaat yang akan diperoleh, pertimbangan biaya dan lain-lain.

h. Penyusunan Rencana Kegiatan Spesifik Lokasi

Setelah matriks ranking disusun yang dilanjutkan dengan matriks prioritas, langkah berikutnya tinggal melanjutkannya pada pengisian matriks rencana kegiatan yang bersifat local spesifik, partisipatif dan operasional. Lokal spesifik artinya rencana kegiatan yang disusun disesuaikan dengan kondisi potensi yang ada di wilayah desa yang bersangkutan. Partisipatif maksudnya proses perencanaan kegiatan yang baik untuk kondisi seperti di pedesaan adalah mencerminkan keterpaduan program/kegiatan yang direncanakan pemerintah dengan perencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sehingga akan terlahir rasa memiliki (*sense of belonging*) yang akan menunjang pada keberlangsungan kegiatan dimaksud. Adapun operasional artinya rencana kerja yang disusun sudah benar-benar siap dijalankan karena jelas apa yang akan dikerjakan, siapa pihak-pihak

pendukungnya, jelas volume dan sumber biayanya, serta jelas pula waktu dan lokasinya.

i. Catatan bagi Tim PRA, Moderator dan Fasilitator

Demi suksesnya implementasi pendekatan PRA, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Bagi tim PRA yang jumlahnya antara 10 sampai 30 orang peserta ²⁴perlu menjaga soliditas dan solidaritas, memiliki komitmen bersama, kembangkan semangat berbagi dan saling menghargai pendapat antar anggota tim.
- b. Bagi moderator yang merangkap sebagai anggota Tim PRA diharapkan mampu mengendalikan jalannya PRA, seperti: membuat kesepakatan waktu pada setiap pertemuan, membangun aktivitas dan partisipasi anggota masyarakat, memimpin diskusi, mengarahkan

²⁴ *Ibid.*, hlm 44

anggotanya untuk menggali potensi, mengidentifikasi permasalahan, merumuskan prioritas dari alternatif solusi, dan menekankan kepada anggotanya bahwa keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama.

Fasilitator/pemandu (biasanya berasal dari unsur aparatur atau orang yang berasal dari luar desa) perlu memfasilitasi jalannya PRA sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Pada setiap tahapan PRA fasilitator perlu memperhatikan luas ruangan diskusi, menyampaikan tujuan pengkajian, membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi, membimbing penyusunan rancangan pengkajian wilayah, menjelaskan pengisian format-format PRA, melakukan variasi teknik dan metode PRA, mengalihkan keterampilan menganalisis dan peran fasilitator sedikit demi sedikit kepada

masyarakat serta perlu mampu menengahi bila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan.²⁵

Adapun penerapan dari metode RRA dan PRA antara lain:

a. Tahap Perkenalan

Dalam perkenalan ada dua tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama perkenalan Pertama dari petugas lapangan yang langsung berhubungan memperkenalkan diri kepada masyarakat. Substansi yang perlu diperkenalkan adalah identitas petugas meliputi instansi tempat bekerja Status yang jelas ini akan sangat membuka hati masyarakat untuk mempercayai siapa sebenarnya petugas yang hadir ditengah-tengan mereka. Tahap kedua, petugas lapang secara aktif mengenal masyarakat/sasaran program.

b. Sosialisasi program sebelum implementasi proyek bukan merupakan hal baru dan selalu dilakukan pada awal kegiatan. program tidak berhasil karena program belum difahami oleh sasaran, sehingga disarankan kegiatan sosialisasi dilakukan sebelum implementasi proyek dan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 44-45

diulang-ulang selama implementasi pada waktu yang tepat.²⁶

- c. Pemetaan wilayah ini merupakan penilaian keadaan
- d. Analisis keadaan berupa : keadaan masa lalu, identifikasi mengenai perubahan yang terjadi serta alasan atau penyebabnya, mengidentifikasi akar permasalahan dan pemecahannya, mengetahui kekuatan dan kelemahan dan menganalisis dengan teknik (SWOT) terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
- e. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang layak dan dapat diandalkan, yang efisien dan diterima oleh system social.
- f. Rincian tentang stakeholder dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program/kegiatan yang akan diusulkan/direkomendasikan.

²⁶ Sri Wahyuni, “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian: Perlunya Implementasi “PRA” Pendekatan Sektoral dan Kultural”. Dalam *Jurnal Pengembangan Ekonomi Pertanian Bogor*, hlm. 5-6

Adapun skema dari Pelaksanaan Metode RRA dan PRA:

Tahapan	Keluar
1. Mengumpulkan data sekunder 2. Karakterisasi sumber daya lahan 3. Mempelajari pengetahuan local 4. Membuat peta bersama 5. Membuat transek bersama 6. Mengumpulkan informasi secara histories 7. Membuat kalender musim 8. Karakterisasi penggunaan lahan 9. Mobilisasi tenaga kerja 10. Analisis keluarga 11. Membuat diagram ven 12. Memprioritaskan permasalahan 13. Membuat rencana kegiatan 14. Menganalisa potensi dan permasalahan kelembagaan	1. Deskripsi sistim analisis 2. Permasalahan penting 3. Data sumber daya lahan dan kelembagaan 4. Kebutuhan masyarakat 5. Garis besar intervensi 6. Inovasi kebijakan

15. Membuat kebijakan	
1. Refleksi inti PRA 2. Diskusi dan evaluasi hasil PRA 3. Memanfaatkan hasil PRA untuk program aksi	1. Realisasi kegiatan

3. FGD (Focus Group Discussion) atau Diskusi Kelompok yang Terarah

a) Pengertian Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta. Definisi lain, FGD adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data kualitatif; di mana sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator mengenai suatu topic.

Sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD merupakan interaksi antar individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal), kemudian oleh

seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang suatu program atau kegiatan yang diikuti dan atau dicermatinya. Dalam pelaksanaan metode FGD melibatkan semua pemangku kepentingan yang menangani suatu program serta melibatkan partisipasi dari masyarakat, maka melalui FGD membentuk forum diskusi yang partisipatif dengan dipandu atau di fasilitasi sebagai seorang pemandu dan bisa juga mengundang narasumber.

Partisipasi atau peserta dari FGD adalah diskusi lebih dari 10 orang yang status sosial tidak sama. Oleh karena itu pemilihan partisipan atau peserta menjadi sangat selektif yang disesuaikan dengan topik yang didiskusikan dan keberhasilan dari pelaksanaan tergantung pada peranan pendamping sebagai medorator dalam FGD.²⁷

b) Tujuan Focus Group Discussion

Tujuan FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik, yang berkaitan dengan

²⁷ Ferdian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 119.

topik yang dibahas. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti (Kresno S. dkk., 1999).

c) Karakteristik dari metode FGD²⁸

- a. Peserta memiliki kesamaan ciri-ciri dan tidak saling mengenal
Jumlah peserta dalam kelompok cukup 7–10 orang, namun dapat diperbanyak hingga 12 orang, sehingga memungkinkan setiap individu untuk mendapat kesempatan mengeluarkan pendapatnya serta cukup memperoleh pandangan anggota kelompok yang bervariasi (Krueger, 1988). Peserta harus mempunyai ciri-ciri yang sama atau homogen. Ciri-ciri yang sama ini

²⁸ Astridya Paramita, Lusi Kristiana, “*Teknik Focus Group Discussion dalam Penelitian Kualitatif*”, dalam *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 16, No 2, April, 2013, hlm.119

ditentukan oleh tujuan atau topik diskusi dengan tetap menghormati dan memperhatikan perbedaan ras, etnik, bahasa, kemampuan baca-tulis, penghasilan dan gender (Krueger, 1988)

- b. Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan FGD

Biasanya FGD dilangsungkan selama 60–120 menit dan dapat dilakukan beberapa kali (Krueger, 1988). Frekuensi tergantung pada kebutuhan penelitian, sumber dana, kebutuhan pembaharuan informasi, serta seberapa mampu dan cepat pola peserta terbaca.

- c. Tempat yang digunakan untuk pelaksanaan FGD

Tempat harus netral, maksudnya suatu tempat yang memungkinkan partisipan dapat mengeluarkan pendapatnya secara bebas.²⁹

B. KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

²⁹ *Ibid.*, hlm. 119

1. Pengertian Program dan Definisi “Kumuh”³⁰

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasi serta mengedepankan partisipasi dari masyarakat. Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena berbagai aspek mulai dari ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

2. Tujuan Program

Tujuan dari program KOTAKU adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Ada indikator dalam pencapaian dari tujuan program (outcome):

³⁰ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*, Jakarta, 2016, hlm. 3

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan lingkungan antara lain (drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran).
- 2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik.
- 3) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan.
- 4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.
- 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program diantaranya diukur dengan merumuskan indicator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.1 drainase, air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; ruang terbuka public)
 2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik.
 3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU
 4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.
 5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.
3. Target Program KOTAKU
- Menurut data base line 100-0-100
- 100 % untuk akses air minum
- 0 % luasan permukiman kumuh
- 100 % akses sanitasi

4. Strategi Program KOTAKU³¹

a. Strategi Dasar

Kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

b. Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat.
- 3) Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor.
- 4) Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya.
- 5) Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk

³¹ *Ibid.*, hlm. 5-6

dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian.

- 6) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan system kota.

5. Prinsip dari Program KOTAKU

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU³²

- a) Pemerintah daerah sebagai Nakhkoda

Adanya kolaborasi antara pemerintah daerah sampai pemerintahan tingkat Kelurahan/ Desa serta melibatkan masyarakat ataupun kelompok peduli lainnya dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh.

- b) Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan program)

Kegiatan penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan.

- c) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

Rencana penanganan permukiman kumuh di skronkan dengan visi kabupaten/ kota dalam RPJM.

³² *Ibid.*, hlm 6.

d) Partisipatif

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up), sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.

e) Kreatif dan Inovatif

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dalam melihat masalah dan peluang yang dibutuhkan dalam penanganan kegiatan penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.

f) Pengelolaan lingkungan dan social untuk mejamin dari keberlanjutan program inventasi KOTAKU harus megedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

g) Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

Prinsip ini bertujuan agar pemerintah tingkat daerah maupun desa dan masyarakat mampu untuk melaksanakan dan mengelola pembangunan

wilayahnya secara mandiri dengan menerapkan tata kelola yang baik.

- h) Investasi penanganan permukiman kumuh harus mendukung perkembangan kota juga harus dapat meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.
- i) Revitalisasi peran BKM, menekankan pada peningkatan peran BKM dari penanggulangan kemiskinan kepada pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.³³

³³ *Ibid.*, hlm. 7

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI OBJEK PENELITIAN PROGRAM KOTAKU DI DESA KRAJANKULON

3.1 Gambaran Umum Desa Krajankulon

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan dari peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus dari usaha pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Desa Krajankulon merupakan Desa yang terdapat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Desa ini termasuk desa yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi sehingga terbagi dalam 12 RW dan 40 RT. Desa Krajankulon sering disebut dengan “kampong santri” karena memiliki beberapa pondok pesantren di dalamnya. Selain itu desa tersebut cukup di kenal dengan desa yang memiliki industri rumahan seperti konveksi bordir, sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh border. Namun seiring berjalannya waktu industry border tersebut semakin meredup dan masyarakat beralih profesi sebagai pedangang. Letak Krajankulon tidak jauh dari Alun-Alun

Kaliwungu, yang mana setiap malam pedagang membuka lapak ditempat itu. Jadi tak heran jika setiap hari desa krajankulon dipadati oleh pedagang kaki lima yang mengakibatkan arus kendaraan terhambat.

Desa Krajankulon merupakan salah satu daerah yang ada di wilayah Kecamatan Kaliwungu Timur Kabupaten Kendal. Wilayah Desa Krajankulon terletak ditengah-tengah pusat keramaian yang ada di Kecamatan Kaliwungu. Desa Krajankulon masuk dalam kategori desa padat penduduk yang terbagi menjadi 3 wilayah dengan luas wilayah sebesar 2,16 km atau (4, 53%) dari luas wilayah kecamatan kaliwungu. ¹

Dusun 1 : jumlah 13 RT 4 RW

Dusun 2 : jumlah 15 RT 4 RW

Dusun 3 : jumlah 12 RT 4 RW

Berdasarkan tata letak dari satelit yang digambarkan dari Wikipedia.com. Batas wilayah administrasi Desa Krajankulon yaitu:

- 1) Sebelah Utara = Desa Mororejo
- 2) Sebelah Timur = Desa Kutoharjo dan Desa Mororejo
- 3) Sebelah Selatan = Desa Protomulyo

¹ Mohammad (PEMDES), Data Profil Desa dan Perkembangan Desa tahun 2016 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Taun 2016

- 4) Sebelah Barat = Desa Sarirejo dan Desa Plantaran²

Tabel 1

Nama-Nama Kampung Desa Krajankulon³

No	Nama Kampung	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Kp. Jambetsari	4 Rt	I
2	Kp. Tanjungsari	1 Rt	II
3	Kp. Jakungan	1 Rt	II
4	Kp. Kranggan	2 Rt	III
5	Kp. Kapulisen	1 Rt	IV
6	Kp. Sawahjati	4 Rt	IV
7	Kp. Petekan	1 Rt	V
8	Kp. Pesantren	1 Rt	V
9	Kp. Saribaru	2 Rt	VI
10	Kp. Pandean Baru	1 Rt	VI
11	Kp. Pandean Lampersari	1 Rt	VI

² Mohammad (PEMDES), Data Profil Desa dan Perkembangan Desa tahun 2016 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Taun 2016

³Sumber Profil Desa, Data Nama-Nama Kampung di Desa Krajankulon

12	Kp. Kandangan Barat	3 Rt	VII
13	Kp. Kandangan Timur	1 Rt	VII
14	Kp. Anyar	3 Rt	VIII
15	Kp. Sarean	1 Rt	IX
16	Kp. Kenduruan	1 Rt	IX
17	Kp. Kauman	2 Rt	IX
18	Kp. Losari	1 Rt	X
19	Kp. Demangan	1 Rt	X
20	Kp. Kembangan	1 Rt	X
21	Kp. Plumbungan	1 Rt	X
22	Kp. Salaman	1 Rt	X
23	Kp. Trikauman	1 Rt	XI
24	Kp. Citran	3 Rt	XI
25	Kp. Pedalangan	1 Rt	XI
26	Kp. Perumahan Kalis Indah	1 Rt	XII

2. Kondisi Sosial Budaya

Desa Krajankulon merupakan desa yang banyak memiliki budaya antara lain *weh-wehan*, *syawalan*, dan *dugderan*, selain budaya masyarakat Desa Krajankulon

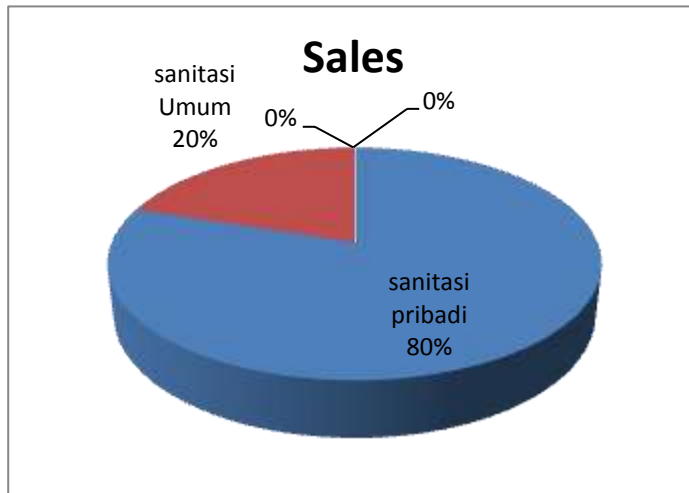
kondisi sosialnya sangat erat, toleransi keberagamaannya sangat erat ini terbukti bahwa masyarakat Desa Krajankulon mayoritas beragama Islam dan juga minoritas ada yang beragama Kristen, Katholik, Hindhu dan Budha. Selain toleransi yang terjaga dengan baik, masyarakat Krajankulon juga masih menjunjung tinggi gotong royong dan tenggang rasa.

Tradisi dan adat istiadat sendiri adalah suatu bentuk peringatan yang sudah dilakukan secara turun temurun sesuai dengan waktu yang ditentukan, setiap daerah pasti memiliki tradisi dan adat istiadat yang beraneka ragam, salah satunya di Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu ini juga memiliki tradisi dan adat istiadat yang biasa orang sebut dengan *weh-wehan*. Tradisi *weh-wehan* merupakan salah satu kebudayaan yang di lakukan oleh hampir semua masyarakat di daerah Kaliwungu, salah satunya di Desa Krajankulon. Tradisi ini di laksanakan pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal (memperingati hari maulud nabi atau kelahiran nabi muhammad).⁴

⁴ Data Profil Desa dan Perkembangan Desa tahun 2016 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Taun 2016

3. Kondisi Sanitasi Desa Krajankulon

Diagram 1
Data Kondisi Sanitasi
Desa Krajankulon⁵



Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan, Desa Krajankulon belum memenuhi kebutuhan sanitasinya secara menyeluruh, terdapat beberapa wilayah seperti RW 007 dan RW 006 dan beberapa RW lainnya yang masyarakatnya masih menggunakan sungai dan MCK umum.

Namun banyak juga masyarakat yang telah memiliki MCK sendiri, hal ini juga didukung dengan adanya bantuan pemerintah terhadap pengadaan jenis sanitasi permanen

⁵ Sumber: (Profil Desa, Kondisi Sanitasi Desa Krajankulon tahun 2016, data dimodifikasi penulis)

kepada penduduk yang kurang mampu. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kondisi MCK umum Desa Krajankulon tergolong cukup kotor dan tidak terawat sedangkan untuk sanitasi permanen (MCK pribadi) memiliki kondisi yang baik.

4. Jumlah Penduduk

Desa Krajankulon merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kaliwungu dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Desa Kutohajo. Hal tersebut didukung dengan letak desa ini yang berlokasi di pusat kecamatan. Sehingga banyak yang berdomisili di Desa Krajankulon. Berikut ini tabel jumlah penduduk tahun 2012-2016.

Tabel 2
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Desa Krajankulon⁶

No.	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1.	2012	4.830	5.293	10123
2.	2013	5.147	5.064	10211
3.	2014	4.928	4.921	9849

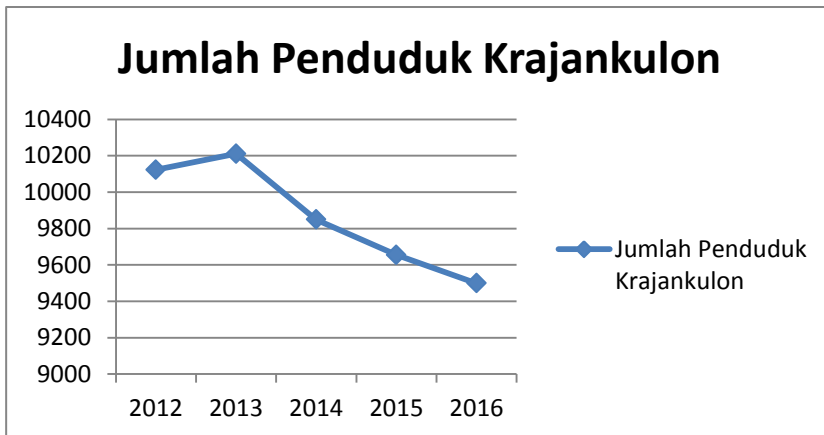
⁶ Sumber: Profil Desa, Jumlah Penduduk Desa Krajankulon tahun 2016

4.	2015	4.795	4.860	9655
5.	2016	4.795	4.680	9499

Grafik 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Krajankulon



5. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Kelompok umur di Desa Krajankulon terdiri dari usia 0-75 dikategorikan menjadi kelompok umur produktif dan kelompok umur non-produktif. Kelompok umur produktif adalah penduduk yang berusia 15-49 tahun, sedangkan kelompok umur non-produktif adalah penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 49 tahun. Penduduk usia produktif di Desa

Krajankulon lebih banyak di bandingkan dengan usia non-produktifnya. Penduduk usia produktif di Desa Krajankulon lebih didominasi oleh laki-laki dari pada perempuannya. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Desa Krajankulon ⁷

Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan
0 – 4	653	659
5 – 9	436	400
10 – 14	442	406
15 – 19	430	407
20 – 24	438	387
25 – 29	446	426
30 – 34	474	463
35 – 39	405	438
40 – 44	398	421
45 – 49	340	358
50 – 54	325	309

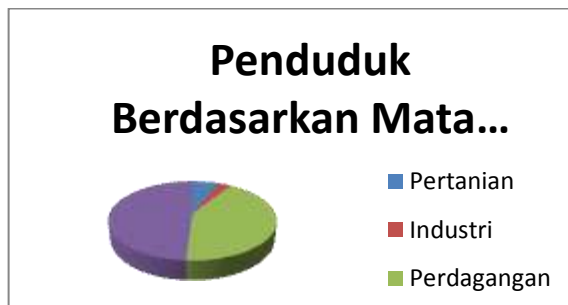
⁷ Sumber: Profil Desa, Data Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Desa Krajankulon, tahun 2016

55 – 59	238	252
60 – 64	185	202
65 – 69	96	130
70 – 74	82	115
75+	112	189

6. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Krajankulon terdiri dari sektor pertanian, industry pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa. Mata pencaharian penduduk tertinggi berada di sektor jasa-jasa kemudian sektor perdagangan, sedangkan mata pencaharian terendah berada pada sektor industri.

Diagram 2
Presentase Berdasarkan Mata Pencaharian
Desa Krajankulon⁸



⁸ Sumber: Profil Desa, Data Jenis Mata Pencaharian, Desa Krajankulon, tahun 2016, data dimodifikasi penulis

7. Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk menurut agama di Desa Krajankulon terdiri dari Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Mayoritas masyarakat di Desa Krajankulon beragama Islam, karena agama Islam di Desa Krajankulon masih begitu kental dengan di tandai banyaknya 10 pondok pesantren yang tersebar disana.

Diagram 3
Presentase Peduduk Berdasarkan Agama
Desa Krajankulon⁹



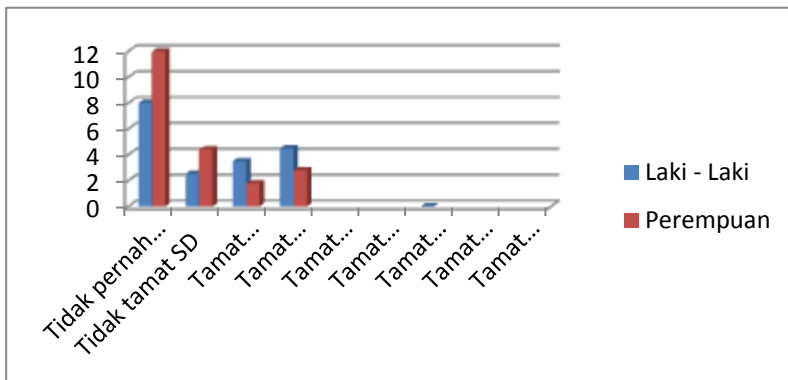
8. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Krajankulon termasuk rendah. Hal tersebut, jika dilihat dari data yang ada tingkat pendidikan dengan jumlah

⁹Sumber: Profil Desa, Presentase Penduduk Berdasarkan Agama, tahun 2016, data dimodifikasi penulis

terbanyak di Desa Krajangkulon adalah tamat SD/ sederajat. Namun, tidak sedikit pula tamatan SMA/ sederajat yang terdapat di desa ini. Berikut tabel dan grafik penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Krajangkulon.

Diagram 4
Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Desa Krajangkulon¹⁰



3.2 Profil Lembaga BKM ANUGERAH

Lembaga BKM ANUGERAH berkedudukan di Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, BKM ANUGERAH didirikan pada hari sabtu tanggal 14 bulan juli tahun 2017. BKM adalah himpunan yang merupakan lembaga

¹⁰ Sumber: Profil Desa , Data Tingkat Pendidikan, tahun 2016, data dimodifikasi penulis

pimpinan kolektif masyarakat warga, BKM juga merupakan milik seluruh masyarakat dan bukan milik pemerintah, perorangan atau kelompok masyarakat tertentu dan merupakan wadah sinergis seluruh masyarakat warga desa. BKM berazaskan Pancasila dan UUD 1945, landasan dan dasar filosofis lembaga ini adalah memberdayakan masyarakat untuk dapat menanggulangi kemiskinan secara kemandirian, efektif dan berkelanjutan.

Visi dan Misi

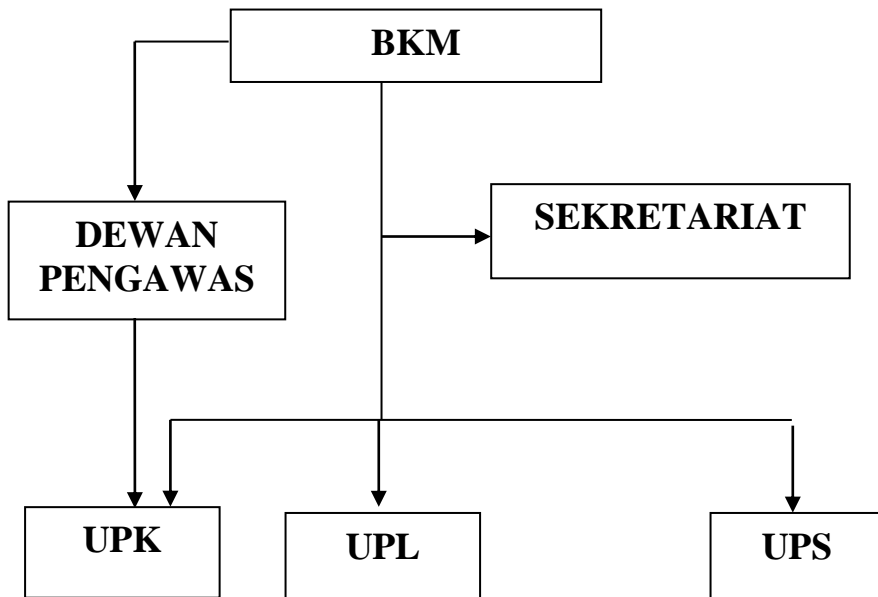
BKM ANUGERAH

1. Visi BKM adalah terciptanya organisasi masyarakat warga di tingkat lokal desa yang memiliki kemampuan strategis untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan.
2. Misi BKM adalah membangun masyarakat melalui penguatan kelembagaan lokal agar menjadi penggerak, motivator dan inisiator terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk secara mandiri melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk dengan menjalin kerjasama sinergis dengan pihak lain, baik pemda (pemerintah daerah), dunia usaha, maupun kelompok perduli.

Peran BKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan

memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial ekonomi dan sarana prasarana dasar serta lingkungan bagi masyarakat miskin.

Gambar Bagan 1
STRUKTUR BKM ANUGERAH
DESA KRAJANKULON KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL



Anggota BKM ANUGERAH Dewan Pengawas UPK

Sekretaris

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Zumarul Faizin | 1. Zumarul Faizin |
| 2. M. Seswanto | 2. Nasichan |
| 3. M. Naimudin MSI | |

M. Sokib M

4. Nur Rokhim Unit Pengelola Keuangan Unit Pengelola Sosial
5. Slamet Dawam Tutik L. Sri Rumiya
6. M. Arifin
7. M. Erwin S Unit Pengelola Lingkungan
8. H. Saefuddin Moh Nur
9. Chayatun
10. M. Mahmud
11. Rikhanah

Tabel 4
Tugas Pokok dan Fungsi BKM

Posisi	Nama	Tugas Pokok dan Fungsi
Koordinator	Zumarul Faizin	Mengkoordinasikan Pokja-Pokja sehingga terjalin sinergisasi dan keberlanjutan program
Pokja Sosial	M. Seswanto M. Naimuddin Nur Rokhim	Menilai kelayakan proposal KSM Sosial. Menyelenggarakan sosialisasi tentang keberadaan BKM sehingga semakin mendapat dukungan dari masyarakat. Menjalin hubungan kerja dengan lembaga lain demi terwujudnya pemberdayaan masyarakat. Menampung aspirasi dan dorongan tingkat partisipasi masyarakat.
Pokja	Slamet Dawam	Menilai kelayakan proposal KSM

Lingkungan	M. Arifin M. Erwin Saputra H. Saefuddin	lingkungan. Menyelenggarakan pemetaan swadaya untuk mendapatkan data yang akurat demi tercapainya pembangunan yang prioritas dan berkesinambungan. Merumuskan data statistik dan data base kemiskinan.
Pokja Ekonomi	Chayatun M. Mahmud Rikhanah	Menilai kelayakan proposal KSM Ekonomi. Pembinaan dan pendampingan KSM ekonomi. Menyelenggarakan pelatihan wirausaha. Berchanneling dengan pihak lain demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris	M. Sokib Marzuqi	Menyusun agenda dan menyelenggarakan rapat/pertemuan BKM. Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat/ pertemuan BKM. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM ataupun pihak lain yang berkepentingan. Mencatat administrasi keuangan operasional BKM dan mencatat

		<p>pengelolaan BLM.</p> <p>Melaporkan administrasi keuangan kepada BKM secara berkala.</p>
Unit Pengelola Sosial (UPS)	Sri Rumiati	<p>Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia.</p> <p>Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/panitia bidang sosial.</p> <p>Membangun/ mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/infokom.</p> <p>Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/ relawan dalam komunitas belajar desa.</p> <p>Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial.</p> <p>Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program sosial UPS.</p>
Unit Pengelola Lingkungan (UPL)	Moh Nur	<p>Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/panitia.</p> <p>Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh KSM/ panitia pembangunan.</p>

		<p>Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat dan terpadu.</p> <p>Menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya.</p> <p>Menjalin kemitraan (Channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL.</p>
Unit Pengelola Keuangan (UPK)	Tutik L	<p>Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM Ekonomi.</p> <p>Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi.</p> <p>Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan.</p> <p>Menjalin kemitraan (cahnneling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK.</p>
Dewan Pengawas UPK	<p>Zumarul Faizin</p> <p>Nasichan</p> <p>Zainul Arifin</p>	<p>Melakukan kajian terhadap kinerja UPK.</p> <p>Melakukan kajian terhadap pembukuan-pembukuan UPK.</p>

		<p>Melakukan penilaian terhadap hasil kajian kinerja UPK dan pembukuan-pembukuan UPK.</p> <p>Membuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap temuan-temuan yang dicapai.</p>
--	--	--

3.3 Pelaksanaan Program KOTAKU

Program KOTAKU (koa tanpa kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun system yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.¹¹

Program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis

¹¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan*, Jakarta, 2016

dengan program pembangunan regular tingkat kelurahan/desa dan kecamatan serta berkoordinasi dengan program tingkat kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan tujuan program berikut tahapan pelaksanaan di tingkat kelurahan/ desa adalah sebagai berikut :

3.3.1 Tahap Persiapan

Pada tahap ini beberapa kegiatan akan dilakukan, yaitu sosialisasi awal di tingkat kelurahan/desa, rembug kesiapan masyarakat (RKM), serta pembangunan kelembagaan perencanaan partisipatif tingkat desa/kelurahan.¹²

1) Sosialisasi awal dan rembug kesiapan masyarakat (RKM)

a) Tujuan

1. Terlaksananya sosialisasi awal kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat kelurahan/desa.
2. Tergalangnya relawan dan agen sosialisasi untuk membantu masyarakat dalam kegiatan penataan permukiman,

¹² Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan*, Jakarta, 2016, hlm., 15

terutama penanganan permukiman kumuh, tingkat kelurahan/desa dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman layak huhi dan berkelanjutan.

3. Terbangunnya kepedulian dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan penataan pemukiman kelurahan/desa melalui program KOTAKU.
 4. Menggalang komitmen untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah kelurahan/desa sampai 2019 untuk mencapai 0 ha permukiman kumuh.
- b) Metode yang digunakan adalah Lokakarya, sosialisasi massal, diskusi, serta metode inovatif yang disepakati di tingkat kelurahan/desa.
- c) Tahapan Proses
1. Sosialisasi awal kota/kabupaten. Dari pemerintah kota/kabupaten termasuk pemerintah kecamatan melakukan sosialisasi awal kepada pemerintah

kelurahan/desa dan BKM/LKM mengenai program KOTAKU.¹³

Pada tahap ini dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2015, bertempat di Gedung Wanita Pendopo Bupati Kendal, dengan mengundang peserta yaitu Camat, Kades, BKM/LKM dan Narasumber dari Pokja PKP, Pemda dan di dampingi oleh fasilitator. Tahap ini membahas mengenai pengenalan program KOTAKU, yang di kupas dalam sosialisasi adalah mengenai apa itu KOTAKU, Visi dan Misi KOTAKU serta tujuan KOTAKU. Selain itu juga membahas mengenai target program KOTAKU yaitu base line 100-0-100. Yang artinya 100% masyarakat mendapatkan sarana air bersih, 0% pengurangan luasan kawasan kumuh, 100% Akses sanitasi yang layak¹⁴

¹³ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan, Jakarta, 2016, hlm., 15

¹⁴Wawancara dengan Bapak Syukur (Faskel Teknis KOTAKU) dan Bapak Solikhun (Koordinator KOTAKU) tingkat kabupaten Kendal, tanggal 12 November 2017

Diharapkan kades serta BKM ANUGERAH krajangkulon mengetahui akan adanya kegiatan KOTAKU, serta dari pihak BKM ANUGERAH bisa bekerjasama dengan PEMDES untuk mensosialisasikan ke warga.

2. Perancangan pesan sosialisasi. Lurah/Kades, camat dan BKM/LKM difasilitasi tim fasilitator merancang pesan, media dan saluran komunikasi yang tepat untuk melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi awal program KOTAKU. Kegiatan ini didahului oleh kegiatan pemetaan sosial oleh unit pengelola sosial (UPS) dan BKM/LKM untuk mengetahui tokoh kunci, potensi agen sosialisasi, pesan, media dan saluran yang paling sesuai untuk melakukan sosialisasi program KOTAKU.

Pada tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2015, bertempat di Gedung Wanita Pendopo Bupati Kendal. Peserta yang di undang adalah camat, kades/lurah, BKM/LKM, dengan Narasumber Pokja PKP, Pemda dan di

dampingi oleh fasilitator. Pada tahap kedua ini kegiatannya adalah perencanaan mengenai perancangan sosialisasi ke warga melalui berbagai media, seperti rembug warga di tingkat RT/RW, melakukan lokakarya di tingkat Desa/Kelurahan, ataupun melalui media cetak yaitu pamflet/ MMT tentang pengenalan program KOTAKU. Kemudian membahas atau belajar pemetaan sosial (pemetaan swadaya miskin) pada pemetaan swadaya miskin yang dipetakan ada 3 indikator yaitu wilayah kumuh, wilayah yang tidak punya akses air bersih dan wilayah yang tidak punya akses sanitasi yang layak.

Hasil dari kegiatan pemetaan tersebut adalah peta sosial, wilayah yang telah dipetakan dan masuk dalam kategori wilayah kumuh adalah RW 01, RW 06, RW 07, RW 11, RW02. Untuk wilayah yang masuk dalam peta yang tidak punya atau membutuhkan sarana akses air bersih berada di wilayah RW 01, RW 02, RW 06, RW 07, RW 08, RW

11. Kemudian untuk wilayah yang tidak punya akses sanitasi yang layak tersebar di wilayah RW 01, RW 06, RW 07, RW 11. Dari hasil pemetaan tersebut maka akan di tindak lanjuti pada tahap perencanaan pemetaan swadaya.¹⁵

3. Sosialisasi awal di kelurahan/desa Lurah/Kepala desa, camat dan BKM/LKM, mengundang masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan sosialisasi awal. Masyarakat yang ikut berpartisipasi terdiri dari seluruh elemen meliputi kelompok rentan, miskin, perempuan, anak dan kelompok mudah terlibat dalam kegiatan ini.¹⁶

Pada tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2015, bertempat di balai desa krajangkulon, mengundang peserta dari aparatur desa, tokoh masyarakat, warga, karang taruna, pkk

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Muh Nur selaku (UPL BKM ANUGERAH) Desa Krajangkulon, Tanggal 1 Desember 2017

¹⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Op. Cit.*, Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan, hlm. 16.

dll. Dengan narasumber dari BKM ANUGERAH serta di damping oleh fasilitator KOTAKU dan Kades/Lurah. Pembahasannya mengenai pengenalan program KOTAKU, visi misi dan tujuan KOTAKU dan target dari program KOTAKU base line 100-0-100.¹⁷

Kegiatan sosialisasi di tingkat desa, diharapkan warga desa krajangkulon mengetahui dan memahami mengenai pengenalan program KOTAKU serta mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh program KOTAKU.

4. Penggalangan relawan dan agen sosialisasi

Relawan merupakan pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. penggalangan dan koordinasi relawan dan agen sosialisasi

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Syukur (Faskel Teknis KOTAKU) tingkat kabupaten Kendal dan Bapak Zumarul Faizin (Koordinator BKM ANUGERAH) Desa Krajangkulon, tanggal 12-13 November 2017

disepakati oleh BLM/LKM dan Lurah/Kades.

Pada tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2015, bertempat di balaidesa krajan kulon, mengundang peserta warga desa yang diwakili oleh tokoh masyarakat RT, RW, tokoh agama dan karang taruna, dengan narasumber BKM ANUGERAH dan di damping Fasilitator.¹⁸

Tahap ini adalah kegiatan rembug warga/ FGD untuk membahas penggalangan relawan, karena dalam proses pelaksanaan program di butuhkan relawan untuk membantu dari segi tenaga/pikiran dalam hal ini diharapkan relawan mempunyai jiwa ikhlas, peduli, mengabdikan dan tanpa pamrih serta memiliki komitmen untuk mewujudkan terget dari base line 100-0-100. Dalam penggalangan relawan tidak ditentukan kriteria khusus tetapi semua elemen umur mulai dari orang tua bisa menjadi

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zumarul Faizin (Koordinator BKM ANUGERAH) Desa Keajankulon, tanggal 13 November 2017

relawan, selain itu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam proses penanganan program KOTAKU seperti yang di jelaskan oleh Bapak Syukur dan Bapak Solikhun selaku fasilitator KOTAKU, bahwa

“program KOTAKU disebut sebagai program pemberdayaan atau pengembangan dikarenakan dalam prosesnya mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan diserahkan 100% dari masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa belajar untuk mengembangkan diri, bertanggung jawab dan mandiri”.¹⁹

Selain itu juga di perkuat lagi oleh pemaparan dari Bapak Solikhun selaku koordinator fasilitator mengenai pentingnya penggalangan relawan, bahwa

“keterlibatan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan karena dalam proses pelaksanaan program KOTAKU, adanya

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Syukur (Faskel Teknis KOTAKU) tingkat kabupaten Kendal, tanggal 12 November 2017

partisipasi dari masyarakat yang nantinya akan menjadi pelaku dalam sebuah proses”.²⁰

Dari hasil penggalangan relawan di peroleh nama-nama yang mengajukan diri menjadi relawan dalam proses pelaksanaan program KOTAKU, relawan ini terdiri dari berbagai wilayah ada di krajangkulon, antara lain :

Tabel 5
Nama-nama Relawan BKM
ANUGERAH

No	Nama	Alamat
1	Irsad	Kp.kranggan rt03/rw 04
2	Srinarno	Kp.anyar rt 02/rw 08
3	Nurul Huda	Kandangan rt 01/rw 07
4	Komsin	Jambet sari rt 01/rw 01
5	Wahyudi	Jambet sari rt 01/rw 01

²⁰ Wawancara dengan Bapak Solikhun selaku (Koordinator Faskel KOTAKU) Tingkat Kabupaten, tanggal 12 November 2017

6	M. Fahrudin	Kandangan rt 04/rw07
7	Tutik lukmawati	Santren rt 02/rw 05
8	Khoiriyah	Santren rt02/rw05
9	M. Taufik	Citran rt 04/11
10	Sohri	Tanjung sari rt 01/rw02
11	Tri Hartanto	Tanjung sari rt 02.rw 02
12	R. Sarjono	Jambet sari rt 02/rw 01
13	M. lukman	Kauman rt 03/ rw 09
14	Sri Rumiati	Kandangan rt 01/rw 07
15	Tamrin	Kp.anyar rt 01/rw 08

Kemudian membentuk relawan yang diberi wadah yang namanya yaitu KSM (kelompok swadaya masyarakat), selanjutnya membentuk panitia KSM yang terdiri dari relawan dan tokoh masyarakat, serta memberi pelatihan dan pemahaman apa mengenai tugas dan

fungsi KSM. Tugas dari KSM adalah menjalankan program yang mendapatkan bantuan.

5. Rembug kesiapan masyarakat

Lurah/Kades dan BKM/LKM melakukan lokakarya tingkat kelurahan/desa untuk membangun kepedulian seluruh pelaku menyukseskan kegiatan penataan permukiman, utamanya penanganan permukiman kumuh.

Pada tahap ini dilakukan pada tanggal 10 Februari 2015, yang bertempat di balaidesa krajankulon, yang dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat RT, RW, tokoh agama dan karang taruna, dengan narasumber BKM ANUGERAH dan di damping Fasilitator. Kegiatan pada tahapan ini adalah mengadakan lokakarya mengenai ajakan untuk warga menumbuhkan kepedulian warga serta tokoh masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyukseskan penataan permukiman. Melakukan berbagai pelatihan yaitu pelatihan

relawan, pelatihan KSM dan pelatihan TIPP.²¹

Hasil dari kegiatan pelatihan tersebut adalah bagi relawan, dengan adanya pelatihan relawan maka relawan mengetahui tugas nya membantu dalam proses teknik pelaksanaan. Kemudian KSM tugasnya yaitu menjalankan suatu program yang akan dilaksanakan kemudia menyusun LPJ dari pelaksanaan tersebut. Untuk TIPP diberi pelatihan mengenai cara mengumpulkan data-data permasalahan yang ada di lingkungan RT/RW, selain itu menilai permasalahan yang ada di lingkung RT/RW dan mengelompokkan jenis permasalahan sesuai dengan base line 100-0-1001.

6. Sosialisasi hasil RKM.

Penyebaran sosialisasi hasil RKM tingkat kelurahan/desa dilakukan dengan melalui berbagai media pamflet. Hasil dari beberapa kegiatan diatas, BKM ANUGERAH menyusun hasil RKM

²¹ Wawancara dengan Bapak Joko (Faskel KOTAKU) tingkat kabupaten Kendal, tanggal 13 November 2017

tersebut dalam bentuk pamflet, pamflet tersebut berisi mengenai pengenalan program serta kegiatan dari program KOTAKU. Pamflet tersebut disebarakan di titik wilayah yang nantinya akan diselenggarakan kegiatan program KOTAKU. Wilayah tersebut antara lain RW 01, RW 02, RW 06, RW 07, RW 08 dan RW 11.

Gambar 1
Sosialisasi program KOTAKU



- 2) Pembangunan Kelembagaan Perencanaan Partisipatif penataan Lingkungan Permukiman tingkat Desa/Kelurahan.²²

- a) Tujuan

1. Terlaksananya review kelembagaan di tingkat kelurahan/desa yang

²² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Op. Cit.*, Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan, hlm. 17

bertanggungjawab untuk merencanakan penataan permukiman secara partisipatif.

2. Berfungsinya lembaga perencanaan partisipatif permukiman yang ada di kelurahan/desa atau membentuk tim inti perencanaan partisipatif (TIPP) baru lagi kelurahan/desa yang belum memiliki lembaga tersebut.
3. Terlaksananya penguatan kapasitas lembaga perencana, lurah/kades dan BKM/LKM untuk memberikan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam memfasilitasi perencanaan partisipatif penataan lingkungan permukiman.
4. Terbangunnya komitmen dan rencana kerja lembaga perencanaan/TIPP untuk melaksanakan program KOTAKU dengan sepenuh hati, mencurahkan kapasitas dan sumber daya dalam memfasilitasi perencanaan partisipatif.

b) Metode

Metode yang digunakan dalam tahapan pembangunan kelembagaan perencanaan partisipatif penataan lingkungan

permukiman tingkat desa/kelurahan diantaranya metode rangkaian diskusi, lokakarya, dan pelatihan/coaching, dan kegiatan inovatif lain.

c) Proses

1. Sosialisasi pembangunan lembaga.
Dengan melakukan sosialisasi untuk pembangunan lembaga perencanaan permukiman tingkat desa/kelurahan. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi awal. Pada saat sosialisasi dijelaskan mengenai peran dan fungsi lembaga. Tujuan sosialisasi yaitu:
 - a. Agar seluruh pihak memahami pentingnya lembaga perencanaan permukiman tingkat kelurahan/desa.
 - b. Membangkitkan kesadaran warga peduli dan memiliki keterampilan di bidang permukiman untuk bergabung dan terlibat aktif dalam perencanaan permukiman.

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2015, yang bertempat di balaidesa krajankulon. Peserta dalam tahapan ini adalah TIPP, tim pelaksanaan dalam tahapan ini adalah Kades Krajankulon, BKM ANUGERAH dan UPS. Dengan mengundang narasumber Pokja PKP, Pemda, Camat dan di dampingi tim fasilitator.²³

Kegiatan pada tahapan ini adalah sosialisasi mengenai penguatan kelembagaan agar membangun tim yang solid dan mengembangkan kapasitas, seperti yang telah dijelaskan pada tahap awal penguatan disini adalah memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi lembaga. Kemudian membentuk tim inti perencanaan partisipatif (TIPP) , pelatihan peningkatan kapasitas TIPP, seperti pelatihan pembuatan proposal pengajuan dan sampai pembuatan laporan pertanggung

²³ Wawancara dengan Bapak Zumarul Faizin (Koordinator BKM ANUGERAH) Desa Krajankulon, tanggal 13 November 2017

jawaban.²⁴ Hasil dari kegiatan ini selain untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga BKM sebagai penampung aspirasi masyarakat serta motor penggerak perubahan. Kemudian membentuk tim inti TIPP, pembentukan tim TIPP ini tidak semua bisa menjadi tim TIPP karena tim TIPP harus mempunyai kemampuan untuk memahami suatu permasalahan yang ada dilingkungan. Anggota TIPP terdiri dari anggota BKM, Relawan yang terpilih, PEMDES dan Tokoh masyarakat.

2. Review kelembagaan. Melakukan review kelembagaan di tingkat kelurahan/desa yang bertanggungjawab untuk merencanakan penataan permukiman secara partisipatif.

3.3.2 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan merumuskan kondisi permukiman layak huni di

²⁴ Wawancara dengan Bapak Solikhun (Koordinator Faskel KOTAKU) tingkat kabupaten Kendal, tanggal 12 November 2017

tingkat kelurahan/desa atau antar kelurahan/desa yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang, sesuai dengan visi dan misi pembangunan permukiman tingkat kelurahan/desa untuk mencapai 0 ha permukiman kumuh yang dituangkan dalam perencanaan penataan lingkungan permukiman (RPLP) dan rencana tindak penataan lingkungan permukiman (RTPLP).²⁵

Penanggung jawab perencanaan penanganan permukiman kumuh di tingkat kelurahan/desa adalah lurah/desa, sedangkan permukiman kumuh antar kelurahan/desa dalam pelaksanaannya dibawah koordinasi pemerintah kecamatan. Pelaksanaan penanganan permukiman kumuh kelurahan/desa dibantu oleh BKM/LKM, TIPP, serta lembaga yang ada di kelurahan/desa atau diwilayah kecamatan. Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan, dan kota/kelurahan dengan didampingi fasilitator dan tenaga ahli terlibat aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan perencanaan partisipatif.

²⁵ Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Op. Cit.*, Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan, hlm. 19

Tujuan perencanaan ini adalah untuk menyelesaikan semua persoalan kumuh yang muncul sebagai indikator/gejala dan akar penyebab permukiman kumuh dari berbagai aspek (pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas, sosial-budaya, ekonomi, lahan dan legal) serta merumuskan program yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi permukiman kelurahan/desa.

A. Membangun visi permukiman dan refleksi perkara kritis (RPK)

Membangun visi permukiman merupakan kegiatan merumuskan cita-cita masyarakat terhadap kondisi permukiman layak huni dan berkelanjutan yang akan dicapai pada masa mendatang dengan tujuan agar perencanaan masyarakat lebih terarah sesuai dengan visi yang ingin dicapai. Tahap membangun visi permukiman dan refleksi perkara kritis (RKP)

a) Tujuan

1. Terbangunnya visi masyarakat mengenai permukiman kelurahan/desa.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi saat ini dan persoalan permukiman di kelurahan/desa, termasuk adanya permukiman kumuh.

3. Terbangunnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya kebersamaan untuk penataan lingkungan permukiman, terutama penanganan permukiman kumuh dan penghidupan yang berkelanjutan.
- b) Metode yang digunakan untuk merumuskan dan membangun visi permukiman dan refleksi perkara kritis (RPK) diantaranya metode rembug, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), dan kegiatan inovatif lain.
 - c) Proses
 1. Melakukan *coaching/on the job training* (OJT) mengenai membangun visi permukiman dan RPK kepada perangkat kelurahan/desa, TIPP, BKM/LKM.
 2. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan membangun visi permukiman dan RPK.
 3. Melakukan sosialisasi kegiatan membangun visi permukiman dan RPK melalui berbagai media.²⁶

²⁶ *Op.Cit.*, hlm 22

4. Melakukan kegiatan membangun visi permukiman melalui serangkaian rembug dan kegiatan lainnya. Proses membangun visi permukiman ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara dan metode seperti FGD, perlombaan, maupun ide-ide kreatif lainnya.
5. Melakukan pelaksanaan FGD RPK. Kegiatan ini untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai: i) kondisi permukiman saat ini dikaitkan dengan target 100-0-100 (terutama jika ada permukiman kumuh), ii) jika ada masalah untuk penanganan permukiman kumuh, FGD membahas akar penyebab dan potensi penyelesaian masalah serta permukiman kumuh adalah masalah bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula, iii) FGD membahas sumber dan potensi penghidupan berkelanjutan, serta iv) komitmen pencapaian visi permukiman yang diharapkan.
6. Melakukan lokakarya tingkat kelurahan/desa untuk menetapkan visi

permukiman, menyepakati hasil RPK, serta komitmen untuk pencapaian visi permukiman.

7. Sosialisasi hasil pelaksanaan membangun visi permukiman dan RPK melalui berbagai media. Visi permukiman harus disosialisasi secara menerus melalui beragam media dan saluran agar diketahui oleh seluruh masyarakat.
8. Berdasarkan hasil sosialisasi hasil visi permukiman dan RPK, lurah/kades dan BKM/LKM, dibantu oleh TIPP, dapat menggalang bantuan teknis terkait perencanaan dan pelaksanaan penataan permukiman kumuh ke berbagai pihak.

Pada tahap membangun visi permukiman ini dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2015, bertempat di balaidesa, dengan mengundang peserta perwakilan warga, dengan narasumber Pokja PKP, Pemda dan Camat. Panitia

pelaksanaan pada tahapan ini adalah Kades, BKM ANUGERAH dan TIPP.²⁷

Kegiatan ini adalah rembug atau FGD bersama warga membahas mengenai pengentasan permasalahan permukiman kumuh yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi di desa krajangkulon yang dituangkan dalam penyusunan visi permukiman kumuh yang disesuaikan dengan desa krajangkulon.

²⁸Dalam penyusunan visi permukiman dibutuhkan partisipasi warga untuk ikut berpendapat, menuangkan ide-idenya yang nantinya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari akar permasalahan serta penyelesaiannya. Setelah ada kesepakatan mengenai visi yang akan digunakan untuk acuan dalam melaksanakan program, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi

²⁷ Wawancara dengan Bapak Zumarul Faizin (Koordinator BKM ANUGERAH), Desa Krajangkulon, tanggal 13 November 2017

²⁸ Wawancara dengan Bapak Solikhun (Koordinator Faskel KOTAKU) tingkat kabupaten Kendal, tanggal 12 November 2017

ke masyarakat tingkat RW, serta melalui media pamflet.²⁹

Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuk visi permukiman desa krajakulon yaitu menciptakan lingkungan krajankulon bersih, asri dan sehat. Menuntaska permasalahan yang menjadi sk kumuh bupati, serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen masyarakat dan pelaku dari mulai relawan, TIPP dan anggota BKM ANUGERAH untuk mencapai target dari base line 100-0-100.

B. Kegiatan pemetaan swadaya

Pemetaan swadaya adalah proses pengumpulan data, identifikasi dan kajian kendala serta potensi yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap kondisi riil wilayah permukiman. Kegiatan pemetaan swadaya difokuskan pada kegiatan konsolidasi data base (base line) dan kajian data & informasi persoalan, potensi, kendala pengembangan sosial ekonomi dan lingkungan serta pengaruh kebijakan pembangunan kota

²⁹ Wawancara dengan Bapak Zumarul Faizin (Koordinator BKM ANUGERAH) Desa Krajankulon , tanggal 13 November 2017

terhadap permukiman kumuh. Kegiatan pemetaan swadaya yang dilakukan, adalah :³⁰

1) Konsolidasi/ review data base (base line) 100 0 100

Kegiatan konsolidasi/review ini merupakan tahap persiapan pemetaan swadaya untuk memahami isi data base (base line) 100 0 100 dan selanjutnya disepakati sebagai data dasar penyusunan perencanaan tingkat kelurahan/desa dan tingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan dengan:

a) Tujuan

1. Memahami isi data base (base line) 100 0 100
2. Melakukan identifikasi kelengkapan dan akurasi data
3. Melakukan sinkronisasi data antar kelurahan/desa yang berbatasan
4. Membangun kesepakatan untuk memanfaatkan data (base line) sebagai data dasar penyusunan perencanaan dengan menerbitkan

³⁰ Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Op. Cit.*, *Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan*, hlm. 23.

memorandum/SK di tingkat
kabupaten/kota

- b) Metode yang digunakan dalam kegiatan pemetaan swadaya adalah rembug dan FGD
- c) Proses
 - 1. Melakukan coaching/ on the job training mengenai kegiatan konsolidasi/review data base (base line 100 0 100) kepada lurah/kepala desa, camat, TIPP, BKM/LKM
 - 2. Mempersiapkan kelengkapan data base (base line) 100 0 100
 - 3. Melakukan rembug/FGD untuk memahami kelengkapan dan akurasi data base (base line) 100 0 100 di tingkat kelurahan/desa.
 - 4. Melakukan rembug/FGD di tingkat kecamatan untuk sinkronisasi data base 100 0 100, antar kelurahan/desa yang berbatasan. Kegiatan ini dilakukan di wilayah kelurahan/desa.
 - 5. Melakukan forum konsultasi 3 di tingkat kota untuk menyepakati hasil

review data base (base line) kelurahan/desa.

6. Merumuskan kesepakatan bersama melalui memorandum atau penerbitan SK pemerintah kabupaten/kota untuk menyepakati data base (base line) 100 0 100 sebagai data dasar penyusunan perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya.³¹

Pada tahap ini waktu pelaksanaan pada tanggal 10 Maret 2015 masih sama dengan pelaksanaan merumuskan visi permukiman. Kegiatan pada tahapan ini adalah diskusi melakukan pelatihan konsolidasi atau pengenalan lebih dalam mengenai data base line 100-0-100. Dalam kegiatan ini fasilitator sebagai pendamping mengarahkan untuk menyusun rencana kerja yang

³¹ *Op. Cit.*, hlm 24

disesuaikan dengan SK dari bupati serta data nase line 100-0-100.³²

Hasil dari kegiatan ini adalah menyocokkan hasil review data base line 100-0-100 untuk menyusun rencana pencegahan kawasan permukiman, data base tersebut adalah mengenai 100% masyarakat mendapatkan sarana sanitasi/ MCK.

2) Pelaksanaan Pemetaan Swadaya

a) Tujuan

1. Melakukan identifikasi persoalan, potensi dan kendala (sosial, ekonomi, lingkungan, nilai-nilai) untuk melengkapi hasil data base (base line) 100 0 100
2. Melakukan kajian pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman berdasarkan data persoalan, potensi dan kendala serta berbagai perencanaan dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang

³² Wawancara dengan Bapak Solikhun (Koordinator Faskel KOTAKU) tingkat kabupaten Kendal dan Bapak Zumarul Faizin selaku (BKM ANUGERAH) Desa Krajankulon, tanggal 12-13 November 2017

mempengaruhi perkembangan kawasan permukiman

3. Melakukan kajian kebutuhan pengembangan (sosial, ekonomi dan lingkungan) kawasan permukiman sesuai standar pelayanan minimum dan sesuai standar pengembangan kawasan permukiman (SNI)
 4. Memberikan pembelajaran pada masyarakat untuk melakukan proses pemetaan kendala dan potensi yang ada di wilayah kelurahan/desa secara partisipatif.
- b) Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemetaan swadaya adalah rembug, FGD dan survey
- c) Proses
1. Melakukan penguatan tim PS yang telah terbentuk
 2. Melakukan coaching/on the job training mengenai pemetaan swadaya kepada lurah/ kepala desa, TIPP, BKM/LKM

3. Menyiapkan peta dasar, data base (base line) permukiman, alat ukur dan peralatan survey lainnya.

Isi peta dasar skala 1:5000, minimal memuat:

- a. Jaringan jalan dan batas-batasnya dan Jaringan pola aliran air (seperti selokan, sungai, dsb)
- b. Hamparan
 - 1) Batas-batas administrative desa/kelurahan
 - 2) Batas-batas lahan/persil
 - 3) Batas-batas deliniasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan permukiman yang berpotensi menjadi kumuh.
 - 4) Batas-batas kawasan sesuai fungsinya seperti kawasan industry, kebun, sawah, bukit, danau, sungai, jurang dll.
 - 5) Batas-batas dataran rendah atau tanah yang terendam air
 - 6) Batas-batas kawasan khusus (kuburan, lindung, dsb)

- c. Bangunan
 - 1) Bangunan rumah yang masih berdiri
 - 2) Bangunan khusus (masjid, gereja, kantor kelurahan/desa, dsb)
 - 3) Sisa-sisa bangunann dll.
- 4. menyiapkan dokumen peraturan daerah, kebijakan dan perencanaan-perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang akan mempengaruhi perkembangan kawasan permukiman.
- 5. Melakukan kajian PS (data base)
 - a. Melakukan kajian persoalan, potensi dan kendala pengembangan sosial, ekonomi dan lingkungan.
 - b. Melakukan kajian terhadap persoalan dan kebutuhan penanganan persoalan 8 indikator kumuh.
 - c. Melakukan kajian persoalan sumber kehidupan dan penghidupan (potensi sumber

daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi keuangan, potensi infrastruktur/fisik, dan potensi sosial) serta melakukan kajian penyelesaian persoalan dan identifikasi kebutuhan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi rumah tangga dan kegiatan usaha lokal produktif serta potensial.³³

- d. Melakukan kajian aspek kepemilikan lahan bangunan
 - e. Melakukan kajian perijinan bangunan/ijin lokasi di kawasan permukiman
 - f. Melakukan review/ tinjauan kebijakan dan perencanaan-perencanaan pembangunan kota.
6. Melakukan kajian/analisis resiko bencana pada kelurahan/desa yang memiliki kawasan-kawasan rawan bencana dan resiko yang ditimbulkan, selain itu analisis yang berkaitan mitigasi bencana.

³³ *Op. Cit.*, hlm. 25

7. Menyajikan hasil kajian kedalam bentuk matriks dan peta-peta tematik analisis/peta GIS
8. Sosialisasi hasil pemetaan swadaya melalui berbagai media.

Pada tahap ini dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2015, bertempat di balaidesa krajangkulon, yang menjadi peserta adalah perwakilan warga, dengan narasumber Pokja PKP serta di dampingi oleh fasilitator, panitia pelaksanaan ini adalah BKM ANUGERAH, Kepala Desa. Dalam kegiatan ini melakukan penguatan PS (Pemetaan swadaya), melakukan pelatihan mengenai cara pemetaan swadaya, kemudian peserta diajak untuk praktek penerapan pemetaan swadaya, selain itu pemetaan swadaya yang dilakukan bertujuan untuk menggalag kepedulian serta partisipasi dari masyarakat, ini juga diperkuat dengan paparan dari Bapak Faizin selaku koodinator BKM ANUGERAH menyatakan bahwa

“langkah pemetaan wilayah yang di lakukan oleh tokoh masyarakat seperti RT bertujuan agar tergalangnya partisipasi aktif dari masyarakat, selain itu juga dikarenakan yang lebih paham dan mengetahui kondisi lingkungan adalah ketua RT dari masing-masing wilayah”.

Selain itu diperjelas lagi oleh pernyataan dari Bapak Syukur selaku fasilitator desa, pada tahap pelaksanaan pemetaan swadaya ini adalah

“pada kegiatan ini merupakan pemilahan/memetakan swadaya yang akan menjadi prioritas program yang akan dilakukan kedepan nanti atau sasaran yang akan menerima dari program tersebut”.³⁴

Kemudian juga belajar pengenalan permukiman kumuh melalui pemetaan yang dimulai dari tahap rona permukiman di wilayah krajangkulon

³⁴ Wawancara dengan Bapak Syukur selaku (Faskel KOTAKU) tingkat Kabupaten, tanggal 12 November 2017

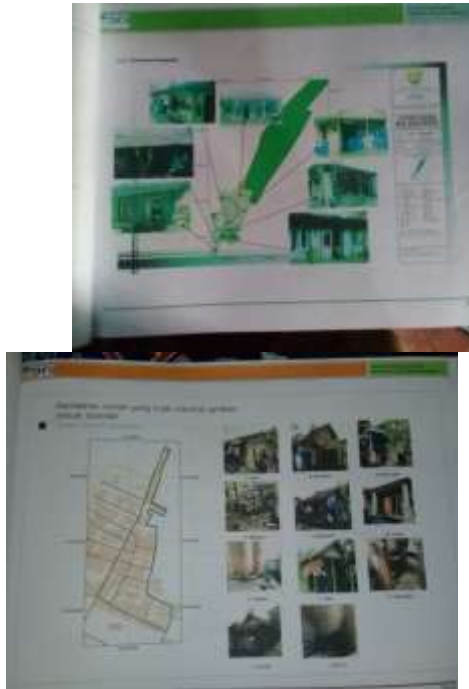
yang disajikan kedalam matriks data dan peta-peta tematik yang meliputi:³⁵

- Data kondisi perumahan
- Data sosial masyarakat terkait budaya dan perilaku warga
- Data dan peta status kepemilikan lahan
- Data potensi sumber daya manusia, alam, keuangan, infrastruktur/fisik serta sosial.
- Peta sistem sarana dan prasarana dasar lingkungan di desa krajangkulon seperti peta sistem jaringan jalan lingkungan, peta sistem jaringan drainase, dan peta jaringan air bersih.
- Peta data miskin yang tidak punya fasilitas MCK/ jamban pribadi.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Solikhun (Koordinator Faskel KOTAKU) tingkat kabupaten Kendal dan Bapak Zumarul Faizin (Koordinator BKM ANUGERAH) Desa Krajangkulon, tanggal 12 November 2017

Gambar 2

Peta kondisi perumahan



3.2.3 Tahap pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur harus sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen RPLP/RTPLP dan RA-P2B. pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel dimana setiap transaksi harus dapat

dipertanggung jawabkan dan dicatatkan dalam pembukuan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah dokumen RPLP/RTPLP dan RA P2B disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di RPLP/RTPLP dan RA-P2B serta merupakan kegiatan prioritas penanganan permukiman kumuh yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya APBN/Bantuan dana investasi, APBD, APB desa, Swasta, Swadaya dll.

Pelaksanaan tingkat kelurahan/ desa meliputi kegiatan ekonomi, sosial dan infrastruktur anatara lain:³⁶

- a. Kegiatan investasi infrastruktur skala lingkungan
- b. Kegiatan ekonomi yang terdiri dari: P2B (ekonomi rumah tangga dan ekonomi lokal) serta kegiatan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

³⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Op. Cit.*, Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan, hlm. 53.

- c. Kegiatan sosial, antara lain pengembangan kapasitas ditingkat Desa/ Kelurahan dapat terdiri dari:
1. Kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya pelatihan/ on the job training kepada LKM/BKM, UP-UP, pemerintahan kelurahan/desa, relawan, TIPP, KSM/panitia, dan masyarakat, sosialisasi menerus.
 2. Pengembangan media warga dan media sosial untuk kepentingan masyarakat.
 3. Pelaksanaan aturan bersama
 4. Pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat
 5. Kegiatan pemasaran program permukiman
 6. Kegiatan sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program dan visi permukiman

Pelaksanaan kegiatan umum dapat dilakukan secara tahunan atau berdasarkan kebutuhan. Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan diseleksi berdasarkan kriteria berbasis kebutuhan dan diprioritaskan adalah yang mempunyai dampak sebesar mungkin untuk

pencapaian tujuan program yaitu 0 ha kumuh dan visi permukiman di tingkat kelurahan/desa.

1. Persiapan Pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan/desa

Dibawah ini adalah tahapan persiapan untuk kegiatan infrastruktur tersier yaitu infrastruktur dengan skala pelayanan tingkat kelurahan/desa.

- a) Tujuan dari kegiatan persiapan pelaksanaan adalah terlaksananya persiapan pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan/desa.
- b) Metode yang digunakan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan/desa yaitu dengan metode pelatihan, pertemuan, FGD dan kegiatan inovatif lainnya.
- c) Proses
 1. Melakukan pelatihan dan coaching/ on the job training mengenai persiapan pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan/desa kepada perangkat kelurahan/desa, TIPP,

BKM/LKM, Unit pengelola lingkungan (UPL), dan UPS.

2. Melakukan sosialisasi kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan/desa melalui berbagai media.
3. Melaksanakan penyusunan rencana kerja persiapan pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan/desa.
4. Penentuan prioritas infrastruktur yang akan dibangun berdasarkan RTPLP. Penentuan prioritas didahului dengan kesepakatan kriteria penentuan prioritas infrastruktur termasuk proses seleksi prioritas infrastruktur tersebut.
5. Sinergi daftar prioritas infrastruktur dengan renstra kelurahan/RPJM desa dan dikonsultasikan dengan pemerintah kota/kabupaten agar dapat dialokasikan anggarannya dalam APBD dan atau APBDes.
6. Penyusunan DED infrastruktur prioritas. Dalam penyusunan ini TIPP dibantu oleh tenaga ahli teknis

menyiapkan DED (peta 1:100-1:50) atau gambar teknis untuk infrastruktur tersier atau skala lingkungan yang ditetapkan sebagai prioritas bangunan.

7. Pembentukan KSM atau panitia pelaksanaan konstruksi secara transparan, partisipatif dan dapat dipertanggung jawabkan.
8. Pembentukan kelompok pemeliharaan (KPP) dan penyepakatan aturan operasi dan pemeliharaan, termasuk adanya iuran pemeliharaan infrastruktur.
9. Penyusunan proposal pembangunan infrastruktur. Didalam proposal tersebut antara lain terdapat DED, metode pengadaan barang dan jasa, rencana kerja, sumber pendanaan termasuk swadaya masyarakat, rencana pengamanan lingkungan dan sosial dll.
10. Persiapan pengadaan barang dan jasa tingkat kelurahan/desa berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa

tingkat kelurahan/desa untuk program KOTAKU.

11. MP2K (musyawarah persiapan pelaksanaan kontruksi) yang memastikan kesiapan pelaksanaan kontruksi dengan mengecek penyelesaian proposal seluruh infrastruktur prioritas oleh KSM/panitia pelaksanaan, metode pengadaan barang dan jasa rencana kerja, pembiayaan kegiatan termasuk swadaya masyarakat, rencana operasi dan pemeliharaan.
12. Melakukan sosialisasi hasil persiapan pelaksanaan kegiatan infrastruktur skala tersier/lingkungan.

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2015 adalah melakukan sosialisasi mengenai PHBS dan pelatihan program yang akan dilaksanakan seperti pelatihan pelaksanaan pembangunan MCK/jamban yang sesuai kriteria standar pembangunan mck di dalam bisktek atau standar dari

KOTAKU, kemudian melakukan sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan infrastruktur melalui media pamflet yang dipasang di wilayah yang akan diadakan pelaksanaan kegiatan infrastruktur jamban.³⁷

Melaksanakan penyusunan rencana kerja pembangunan jamban. Dalam kegiatan ini KSM melakukan perencanaan dengan rewalan mengenai membuat proposal pengajuan kegiatan sesuai dana yang diturunkan mulai dari 60% 30% dan 10%, dalam pembuatan proposal pengajuan di dampingi oleh anggota BKM bidang UPL. Setelah selesai pelaksanaan pembangun, KSM dan relawan membuat laporan penanggung jawaban program yang sudah terlaksana. Dalam pembuatan LPJ KSM

³⁷ Wawancara dengan Bapak Syukur (Faskel KOTAKU) Tingkat Kabupaten Kendal, tanggal 12 November 2017

dan relawan di dampingi oleh UPL dari BKM ANUGERAH.³⁸

Gambar 3

Tahap pelaksanaan



³⁸ Wawancara dengan Bapak Zumarul Faizin (Koordinator BKM ANUGERAH) Desa Krajankulon, tanggal 13 November 2017

3.3 Hasil Pengembangan Masyarakat oleh program KOTAKU

Desa krajangkulon terpilih menjadi desa yang masuk dalam program KOTAKU, hal yang ingin di capai oleh program KOTAKU adalah base line 100-0-100, salah satu program yang terlaksana adalah program di bidang infrastruktur/lingkungan yaitu “jamban sehat”. Melalui BKM ANUGERAH sebagai motor penggerak masyarakat dalam program KOTAKU yang di laksanakan di Desa Krajangkulon.

3.3.1 Hasil Pengembangan KOTAKU secara fisik

1. Dari data keseluruhan yang ada di BKM ANUGERAH mengenai jumlah dari masyarakat yang belum memiliki jamban pada tahun 2015 adalah ada 67 kepala keluarga/ Rumah. Acuan yang di pakai oleh BKM ANUGERAH adalah menggunakan data tersebut, namun untuk memilih warga yang nantinya akan mendapat bantuan fasilitas tersebut, melalui tahap penentuan skala prioritas yang mengacu pada standar indikator yang di pakai oleh KOTAKU, yaitu benar-benar terdata sebagai warga miskin, belum memiliki fasilitas jamban serta status lahan milik sendiri. Mengingat dana yang diluncurkan tidak bisa membantu secara keseluruhan, maka untuk menentukan nama KK menggunakan skala

prioritas, karena dana yang cair dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2015 sebesar 100 juta. Pada tahun 2015 pembangunan jamban pribadi/MCK sudah terbangun sebanyak 24 rumah/ KK yang mendapatkan program tersebut. Dana yang diberikan oleh KOTAKU untuk setiap penerima manfaat sebanyak Rp. 3.800.00, selebihnya dari swadaya masyarakat. Data penerima manfaat yaitu :

Tabel 6
Nama-Nama Penerima Manfaat Jamban Sehat

No	Nama Penerima	Alamat
1.	Misnadi	RT 07/RW 08
2.	Widodo	RT 07/ RW 08
3.	Suryani	RT 07/ RW 08
4.	Miftahul Jannah	RT 07/ RW 08
5.	Yuliati	RT 07/ RW 08
6.	M. Abdul Asroi	RT 07/ RW 08
7.	Parmiyah	RT 07/ RW 08
8.	Rozikhan	RT 07/ RW 08
9.	Ngarno	RT 04/ RW 07
10.	M. Fuadi	RT 03/ RW 04

11.	Moch Ghofir	RT 01/ RW 010
12.	Suswanto	RT 04/ RW 011
13.	Nur Azizah	RT 02/ RW 08
14.	Fatimah	RT 02/ RW 07
15.	Chamidah	RT 05/ RW 04
16.	Jumiatun	RT 04/ RW 011
17.	Sunardi	RT 02/ RW 04
18.	Imron Mashadi	RT 03/ RW 04
19.	Moh Syafik	RT 03/ RW 04
20.	Latifah	RT 04/ RW 04
21.	Sudirman	RT 03/ RW 08
22.	Rochim	RT 03/ RW 011
23.	Sopiyah	RT 03/ RW 04
24.	Richanah	RT 03/ RW 04

2. Adanya pembentukan KSM di wilayah yang diadakan pelaksanaan infrastruktur jamban sehat, yaitu pembentukan KSM di wilayah:

- 1) Kampung Sawahjati (KSM Segar Berseri 2)
- 2) Kampung Losari (KSM Segar Berseri 4)
- 3) Kampung Citran (KSM Segar Sari)
- 4) Kampung Anyar (KSM Segar Berseri 3)

- 5) Kampung Kandangan Timur (KSM Segar Berseri 3)
 - 6) Kampung Kauman Utara (KSM Segar Berseri 2)
 - 7) Kampung Tridasari (KSM Segar Berseri 2)³⁹
3. Adanya evaluasi atau monitoring pada saat pelaksanaan pembangunan dan evaluasi setelah pembangunan selesai.

Pada saat proses pembangunan MCK/Jamban sehat adanya monitoring oleh anggota BKM yaitu oleh Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL) Bapak Muh Nur. Monitoring dilakukan selama seminggu sekali. Dalam pemantauan ada indikoator yang di monitoring pada saat pelaksanaan yaitu :⁴⁰

- 1) Material mulai dari Batu Bata, pasir dll sesuai standar
- 2) Jarak antara WC kesepitank minimal 10 M
- 3) Pemantauan mengenai pembuatan proposal pengajuan sesuai dana yang di turunkan bertahap mulai dari 60%, 30% dan 10%.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Muh Nur (UPL BKM ANUGERAH) Desa Krajankulon, tanggal 13 November 2017

⁴⁰ Wawancara dengan Zumarul Faizin (Koordinator BKM ANUGERAH) Desa Krajankulon, tanggal 13 November 2017

- 4) Adanya pemantauan mengenai LPJ dari pelaksanaan program KOTAKU
- 5) Setelah pelaksanaan pembangun selesai diadakan evaluasi 3 bulan sekali dalam kurun waktu 1 tahun. Evaluasi dilakukan oleh koordinator BKM di dampingi oleh UPL dan Fasilitator KOTAKU.

Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh UPL (Unit Pengelola Lingkungan) BKM ANUGERAH sudah sesuai dengan standar dari bistek yang ada di proposal, mulai dari segi material, rencana bentuk bangunan sampai dengan jalannya pelaksanaan pembangunan. Kemudian pembuatan proposal sudah sesuai standar sehingga dana bisa turun melalui 3 tahap, selain itu dari hasil pelaksanaan untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan tersebut terhadap keluarga penerima manfaat. Maka dari pihak BKM ANUGERAH khususnya UPL beserta di dampingi fasilitator mengenai hasil, evaluasi dilakukan 3 bulan sekali dalam kurun waktu 1 tahun telah memberikan gambaran bahwa terjadi perubahan dari segi perilaku serta kebiasaan masyarakat mengenai BAB. Menurut pantuan yang dilakukan BKM

ANUGERAH, pembangunan jamban sehat sudah berhasil guna memberikan fasilitas MCK untuk kebutuhan BAB. Selain itu adanya pemeliharaan dari anggota penerima manfaat mengenai perawatan MCK sehingga kebersihan terjaga. Keterangan diatas di perkuat oleh faskel Bapak Solikhun, Bapak Joko dan Bapak Syukur, bahwa

“program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar, karena untuk mencapai target dari program KOTAKU di Desa Krajankulon adalah sesuai data base line 100-0-100”.⁴¹

3.3.2 Hasil pelaksanaan dari sisi Non Fisik

Sarana fasilitas jamban sehat sangat menunjang bagi kualitas kesehatan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan dan menciptakan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Namun dalam kenyataannya yang ada dilapangan, masih banyak kebiasaan dari warga yang tidak memiliki MCK ketika akan BAB banyak yang lari ke sungai, cemplung dan kebon. Walaupun dari pihak pemdes sudah sering memberikan sosialisasi mengenai PHBS melalui bidan desa kepada masyarakat, namun jika

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Solikhun, Bapak Syukur, dan Bapak Joko selaku (Faskel KOTAKU) tingkat Kabupaten Kendal, tanggal 12 November 2017

tidak ditunjang oleh bantuan pembangunan MCK maka hasilnya tidak akan maksimal untuk merubah pola pikir serta perilaku/kebiasaan dari warga yang melakukan buang air besar sembarangan. Adapun yang menjadi faktor utama dari ketidak adanya sarana MCK adalah pendapatan rumah tangga dibawah standar/kekurangan, selain itu juga timbul penyakit yang diakibatkan oleh perilaku BAB sembarangan, meliputi diare dan cacingan.

Menurut data dari UPTD puskesmas kaliwungu mengenai angka penderita penyakit diare, dibawah usia 15 tahun, umur 1 tahun ada 5 anak, umur 4 tahun ada 13 anak, umur 5-14 tahun ada 41 anak dan umur 15 tahun ada 38 anak. Kemudian masuk program KOTAKU di desa krajankulon dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Menurut Bapak Faizin selaku koordinator BKM ANUGERAH mengenai hasil dari pelaksanaan pembangunan prasarana MCK/Jamban Sehat, bahwa

“Dengan terlaksananya program base line 100-0-100, dimana bidikan prioritas utamanya adalah masalah 100% menuntaskan sanitasi, target program ini sudah terlaksana sesuai standar dari indikator target program KOTAKU”.⁴²

Selain itu tercapainya upaya perubahan perilaku pada masyarakat, dikuatkan dari pernyataan Bapak Syukur selaku fasilitator, menyatakan bahwa

“program 100% pengadaan MCK/Jamban Sehat sangat efektif dan memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat”.⁴³

Kemudian Menurut keterangan Bapak Misnadi, Bapak Widodo, Ibu Azizah selaku penerima manfaat, bahwa

“dengan adanya program jamban sangat membantu kami para penerima manfaat untuk memiliki fasilitas MCK pribadi, dengan begitu bisa meningkatkan perilaku ke arah hidup yang lebih sehat serta tidak perlu lagi untuk BAB disembarang tempat”.⁴⁴

⁴² Wawancara dengan Bapak Zumarul Faizin selaku (Koordinator BKM ANUGERAH) Desa Krajankulon, tanggal 13 November 2017

⁴³ Wawancara dengan Bapak Syukur selaku (Faskel KOTAKU) tingkat Kabupaten Kendal, tanggal 12 November 2017

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Misnadi, Bapak Widodo dan Ibu Azizah selaku (penerima manfaat jamban sehat program KOTAKU) Desa Krajankulon, tanggal 15 November 2017

Pemahaman penerima manfaat mengenai PHBS setelah mendapat program jamban sehat, masyarakat sudah mempraktekkan pola perilaku sehat, seperti menjaga kebersihan rumah, adanya perawatan MCK/Jamban sehat, kesehatan dari anggota keluarga terjaga.⁴⁵

Menurut keterangan dari ketua RT masing-masing wilayah pelaksanaan jamban sehat, memberi keterangan bahwa setelah adanya pembangunan jamban sehat di wilayahnya masing-masing memberikan manfaat besar bagi warganya khususnya yang tidak memiliki jamban sehat. Dengan begitu warga yang sebelumnya BAB di kebon dan di sungai, sekarang warga yang BAB disungai atau di kebon sudah berkurang, walaupun banyak kendala dan pertimbangan saat menentukan prioritas penerima manfaat. Dengan adanya bantuan tersebut dapat menerapkan pola perilaku menjaga kesehatan baik lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Program KOTAKU khususnya di pembangunan jamban sehat sangat efektif dan membantu masyarakat miskin untuk memiliki akses jamban pribadi/jamban sehat, dengan

⁴⁵ Wawancara dengan Penerima Manfaat Jamban Sehat, Desa Krajankulon, tanggal 10 November 2017

begitu masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidup menuju taraf hidup yang sehat dan sejahtera.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Ketua RT Masing-masing Wilayah Penerima Manfaat “Jamban Sehat”, Desa Krajankulon, tanggal 11 November 2017

BAB IV

ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI DESA KRAJANKULON

1. Analisis Model Pengembangan Masyarakat melalui KOTAKU

Dalam penelitian ini, program KOTAKU menurut data-data dari buku standar operasional kerja serta temuan yang ada dilapangan, bahwa pelaksanaan program KOTAKU ada tahapan-tahapannya. Kemudian tahapan-tahapan tersebut dianalisis untuk mengkonfirmasi jawaban informan dengan data sekunder. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan peneliti adalah tahap perencanaan dan pelaksanaan.

A. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi atau merumuskan kondisi di lingkungan desa karajankulon yang disesuaikan oleh visi pembangunan desa. Tujuan dari perencanaan adalah untuk menyelesaikan semua persoalan kumuh yang menjadi indikator atau akar penyebab permukiman kumuh dari berbagai aspek seperti pelayanan prasarana dan sarana. Dalam pelaksanaan program pengembangan, partisipasi dari masyarakat menjadi tonggak awal dalam sebuah pelaksanaan. Oleh karena itu untuk menumbuhkan kepedulian serta semangat keikutsertaan

atau partisipasi dari masyarakat maka di aplikasikan dengan mengadakan penggalangan relawan, karena pada dasarnya program ini adalah yang melaksanakan masyarakat namun tidak terlepas dari adanya pendampingan dari BKM sebagai motor penggerak masyarakat dan fasilitator, gunanya agar masyarakat bisa mengembangkan diri, bertanggung jawab dan mandiri.

Peran dari pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan fasilitator hanya sebagai pendamping serta memfasilitasi setiap tahapan. Pada tahap-tahap yang dilakukan tidak terlepas dari keterlibatan partisipasi dari masyarakat.

Selain itu diharapkan dari tujuan perencanaan program KOTAKU, yaitu untuk menyelesaikan semua persoalan kumuh yang muncul sebagai indikator atau akar penyebab permukiman kumuh, baik itu dari aspek (pelayanan prasarana dan utilitas serta sosial budaya).

Dalam proses penyelesaian masalah dalam sebuah program tidak terlepas adanya perencanaan. Proses perencanaan sosial lebih menekankan pada “tujuan tugas”, menurut Roux focus utama patisipatory planning bukan hanya menghasilkan suatu, akan tetapi menciptakan ruang dialog antar berbagai pelaku dengan berbagai harapan atau tujuan yang hendak dicapai persepsi dan interpretasi berkenaan dengan persoalan dan

isu yang diungkapkan dan dirundingkan.¹ Kegiatan dalam tahap perencanaan diantaranya ;

1) Tahap Persiapan Pemetaan Swadaya

Dalam kegiatan persiapan pemetaan swadaya dilakukan dengan pengumpulan data, identifikasi kajian kendala serta potensi yang dilakukan oleh BKM ANUGERAH terhadap kondisi kenyataan yang ada di lapangan. Pada awalnya kegiatan persiapan pemetaan swadaya dilakukan oleh BKM ANUGERAH serta perwakilan tokoh masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada tahap proses Perancangan Pesan Sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung Wanita Pendopo Bupati Kendal, dalam proses perancangan pesan juga membahas mengenai pemetaan sosial. Dari data tersebut kemudian di telaah atau di sinkronkan dengan data base line 100-0-100, sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan tahap persiapan pemetaan swadaya diantaranya adalah :

- 1) Untuk memahami isi data base line 100-0-100

¹ Dewi Sawitri, "*Profesi Perencanaan Dalam Perencanaan Partisipatif Suatu Kajian Teori dan Praktek Perencanaan*", dalam *Jurnal Kesehatan* , No 23 a, Juni 2004, hlm. 22-23

- 2) Melakukan identifikasi kelengkapan data dan akurasi data.
- 3) Membangun kesepakatan untuk memanfaatkan data base line sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan penyelesaian sesuai SK Kumuh Bupati.

Selanjutnya pada tahapan ini BKM ANUGERAH sebagai pemberi fasilitas kepada masyarakat dengan mengundang masyarakat serta Fasilitator untuk melakukan persiapan pemetaan swadaya, tujuannya supaya masyarakat bisa belajar mem-metakan swadaya.

Penjelasan diatas kemudian diambil hasil dari pada penyusunan perencanaan yang disesuaikan atau di cocokan dengan data base line 100-0-100, maka diambil kesepakatan program utama yang akan dilaksanakan hasilnya adalah mengenai data base line 100% pengadaan prasarana sanitasi MCK/Jamban Sehat, ini dikarenakan setelah adanya kajian mendalam dan usulan terbanyak dari tokoh masyarakat dari tiap masing-masing wilayah mengenai pengadaan prasaranan MCK/ Jamban Sehat. Selain itu juga di perkuat dengan data dari Desa Krajankulon, bahwa Desa Krajankulon masih

ada 20% dari masyarakat yang belum memiliki fasilitas/prasarana MCK/Jamban Sehat, serta kondisi MCK umum Desa Krajankulon tergolong cukup kotor dan tidak terawat. Dalam tahap persiapan pemetaan swadaya, masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan persoalan wilayah permukiman kumuh.

Dari uraian diatas setiap tahap-tahap dalam perencanaan menurut penulis mengacu pada teori pendekatan metode RRA, PRA dan FGD. Metode RRA (Rapid Rural Appraisal) terletak pada saat penggalian data dilapangan mengenai pemetaan wilayah kumuh, karena RRA merupakan sebuah metode penilaian data dan keadaan desa secara cepat kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh orang luar dan bisa melibatkan masyarakat setempat. RRA menggabungkan beberapa teknik diantaranya i) review/ telaah data sekunder, ini termasuk pengamatan peta wilayah dan pengamatan lapangan, ii) observasi atau pengamatan lapangan secara langsung².

Sedangkan PRA (Participatory Rural Appraisal) sebagai sebuah proses partisipasi

² Totok, Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat, Bandung*, ALFABETA, 2013, hlm. 199

masyarakat dalam menganalisis masalah permukiman kumuh serta mencari pemecahan masalahnya, dimana dalam proses tersebut adanya partisipasi dari masyarakat, relawan, RT/RW, PEMDES Krajankulon, anggota BKM ANUGERAH, TIPP dan didampingi fasilitator dalam mencari solusi. PRA merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif yang dilakukan kegiatan pemetaan wilayah, analisis keadaan, dan pemilihan alternatif pemecahan masalah. Dalam PRA keterlibatan dari masyarakat sangat diperlukan, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka bisa memudahkan untuk membuat perencanaan penyelesaian suatu masalah yang disesuaikan dengan keadaan lapangan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Prinsip dasar dari PRA antara lain i) saling belajar dan berbagi pengetahuan, ii) keterlibatan semua anggota kelompok masyarakat, iii) orang luar sebagai fasilitator.³

Pada forum ini juga menggunakan metode FGD karena ini merupakan diskusi terarah dalam

³ Asep Supriatna, “*Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Desa*”, dalam *Jurnal Lingkar Widya*swara, Vol. 1, No.1, Jan-Mar 2014, hlm. 41

mencari alternatif penyelesaian masalah yang dihadiri oleh lebih dari 10 orang. Menurut teori FGD merupakan interaksi antar individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal, kemudian oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman atau pengalamannya tentang suatu program atau kegiatan yang diikuti dan atau dicermatinya, dalam pelaksanaan FGD melibatkan semua pemangku kepentingan yang menangani suatu program serta melibatkan partisipasi dari masyarakat.

Tujuan FGD adalah untuk *mengeksplorasi* masalah yang spesifik, yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Selain itu karakteristik dari FDG antara lain i) memiliki kesamaan ciri-ciri dan tidak saling mengenal, ii) waktu yang digunakan dalam pelaksanaan FGD dan iii) tempat yang digunakan dalam pelaksanaan FGD.⁴

2) Pelaksanaan pemetaan swadaya

Pemetaan swadaya merupakan kelanjutan dari tahapan persiapan pemetaan swadaya. Dalam pelaksanaan pemetaan swadaya mengacu pada data

⁴ Astridya Paramita, Lusi Kristiana, “*Teknik Focus Group Discussion dalam Penelitian Kualitatif*”, dalam *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 16, No 2, April, 2013, hlm.119

base line serta review base line 100-0-100, pada forum sebelumnya mengenai persiapan pemetaan swadaya diperoleh data atau kesepakatan mengenai prioritas yang menjadi bidikan target yaitu 100% pengadaan pasarana MCK/ Jamban Sehat. Pada kegiatan ini tidak terlepas kaitannya mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan pemetaan swadaya, tujuan tersebut diantaranya:

- 1) Melakukan kajian pencegahan atau peningkatan kualitas permukiman berdasarkan persoalan, potensi dan kendala serta berbagai perencanaan dan kebijakan pemerintah.
- 2) Melakukan kajian kebutuhan pengembangan (sosial, ekonomi, dan lingkungan) sesuai standar pelayanan minimum dan sesuai standar pengembangan kawasan permukiman (SNI)
- 3) Memberikan pembelajaran pada masyarakat untuk melakukan proses pemetaan kendala dan potensi yang ada di wilayah kelurahan/desa secara partisipatif. Pada tahap ini melakukan (penguatan pemetaan swadaya).

Pada pelaksanaan pemetaan swadaya yang menjadi focus penyelesaian permasalahan permukiman kumuh adalah 100% akses sanitasi

yaitu pengadaan MCK/ Jamban Sehat. Dalam melakukan kajian terhadap persoalan atau kebutuhan penanganan disesuaikan dengan indicator dari pengadaan prasarana MCK/Jamban Sehat diantaranya i) tercatat atau terdata sebagai warga miskin, ii) tidak memiliki fasilitas MCK, iii) status kepemilikan lahan bangunan.dan, iv) dampak terbesar terkait budaya, perilaku atau kebiasaan BAB sembarangan.

Pada tahap pemetaan sosial yang sebelumnya telah didapat data wilayah yang tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Kemudian diputuskan skala prioritas sasaran atau penerima manfaat jamban sehat sesuai indicator yang telah dijelaskan diatas, serta mengingat subsidi dari pemerintah hanya 100 juta, maka dana tersebut hanya bisa mencangkup 24 penerima manfaat. Pemilahan tersebut disesuaikan dengan skala prioritas serta berdasarkan usulan dari tokoh masyarakat di wilayah masing-masing dan di buktikan melalui survey lapangan oleh BKM ANUGERAH serta Tim Fasilitator sebagai pendamping.

Menurut penulis pada tahap pemetaan swadaya menggunakan metode pedekatan FGD serta

PRA. Dalam forum ini tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, BKM, PEMDES dan didampingi fasilitator dalam mencari prioritas sasaran atau penerima manfaat pada target base line 100-0-100.

Karena *Focus Group Discussion* (FGD) adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta. Definisi lain, FGD adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data kualitatif; di mana sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator mengenai suatu topik. Dari berbagai sumber disimpulkan bahwa siklus pendekatan PRA adalah sebagai berikut : ⁵

- a. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi wilayah pedesaan secara umum.
- b. Perumusan masalah dan penetapan prioritas masalah;
- c. Identifikasi alternatif pemecahan masalah;

⁵ Asep Supriatna, “*Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Desa*”, dalam *Jurnal Lingkar Widya*swara, Vol. 1, No.1, Jan-Mar 2014, hlm. 40

- d. Pemilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia;
- e. Perencanaan penerapan gagasan;
- f. Penyajian rencana kegiatan guna mendapatkan masukan dan penyempurnaan di tingkat yang lebih besar;
- g. Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat;
- h. Pemantauan dan pengarahan;
- i. Evaluasi dan rencana tindak lanjut

Pada tahap persiapan dan perencanaan, tidak terlepas dari adanya partisipasi dari masyarakat, sebuah program akan efektif bila para pelaksana program memahami tujuan dari program 100% akses sanitasi. Dari uraian diatas selaras dengan teori pengembangan masyarakat menurut Christenson dan Robinson “bahwa community development merupakan hal yang lebih penting adalah partisipasi dari masyarakat yang dibutuhkan dalam sebuah proses”. Pada tahap perencanaan ini menurut penulis serta menyingkronkan yang ada dilapangan bahwa pada tahapan ini adalah menggunakan model pengembangan masyarakat perencanaan sosial.

Model pengembangan masyarakat perencanaan sosial adalah perencanaan sosial yang dimaksudkan untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu, seperti kemiskinan, pengangguran, serta kesehatan.⁶

B. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan baik dalam aspek kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah di susun dalam dokumen RPLP. Karena dalam pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan secara *transparan* dan *akuntabel* dimana setiap transaksi harus bisa dipertanggung jawabkan dan di catat dalam pembukuan. Bentuk dari tahap pelaksanaan ada dua tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan awal dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai PHBS oleh BKM ANUGERAH serta dari bidan Desa. Kemudian tahap pelaksanaan berikutnya adalah adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh BKM untuk relawan-relawan yang menjadi anggota KSM dan TIPP. Karena program ini program pengembangan yang mana dari proses tahap persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan diserahkan 100% dari masyarakat, karena masyarakatlah

⁶ Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, Refika Aditama, 2014

yang menjadi pelaku dalam proses pelaksanaan program, namun tidak terlepas dari pendampingan pihak BKM dan fasilitator KOTAKU. Maka untuk bisa mencapai target serta tujuan dari program KOTAKU.

Masyarakat yang menjadi relawan diberikan bekal mengenai ilmu atau pemahaman secara teknis maupun materi mengenai cara kerja program, pembuatan proposal dan LPJ sampai nanti pada pelaksanaan pembangunan. Pada pelaksanaan pembangunan, KSM yang mempunyai peran utama serta dari penerima manfaat, untuk bisa mencapai pembangunan yang maksimal maka KSM harus dibentuk, karena program KOTAKU telah menggerakkan masyarakat untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri dengan adanya KSM.

Selain itu KSM juga mempunyai peran membantu monitoring dalam penggunaan material serta kesesuaian bangunan nyata dengan yang ada di bistek proposal. Pada tahapan ini menurut analisis penulis menggunakan model pembangunan aksi sosial, karena aksi sosial merupakan perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan serta struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan dan pengambilan keputusan. Aksi sosial menekankan pada tujuan proses dan tujuan hasil melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih

memenuhi prinsip demokrasi, kemerdekaan dan keadilan.⁷ Menurut Herbert Thelen mengemukakan ada Sembilan langkah dalam mengimplementasikan ide seseorang untuk menjadi program komunitas antara lain:

- a. Adanya ide dari seseorang
- b. Adanya pengarahan/ kepemimpinan
- c. Melakukan kontak ke masyarakat
- d. Membuat perencanaan program
- e. Melakukan tahap awal aksi
- f. Mengadakan opini public
- g. Melakukan kerjasama dengan kelompok lain
- h. Menyebarkan program ke seluruh jaringan masyarakat

Dari dua tahapan diatas, program KOTAKU sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari target program KOTAKU yaitu data base line 100 % akses sanitasi. Program ini sangat efektif dan efisiennya dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya modal, karena program ini dirancang khusus untuk memberdayakan atau mengembangkan masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya sebagai fasilitator yang menyediakan anggaran dana sesuai kebutuhan.

⁷ Anna Fatchlya”*Model Aksi Sosial pada Masyarakat Petambak di Wilayah Pesisir Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi*”, dalam *Jurnal Buletin Ekonomi Perikanan*, Vol. VIII. No. 2, Tahun 2008, hlm. 5-6

2. Analisis Hasil Pengembangan Masyarakat melalui KOTAKU

a. Aspek Tujuan KOTAKU

Tujuan dari program KOTAKU, tujuan tersebut yaitu :

1) Menurunnya luas permukiman kumuh⁸

Pada tahap sebelumnya telah dibahas mengenai titik wilayah kumuh yang tadinya ada di 4 RW namun data tersebut mengalami pemekaran menjadi 7 RW, hal ini didasarkan atas penggalian atau kajian pemetaan yang di lakukan oleh BKM beserta beberapa tokoh masyarakat di wilayah masing-masing.

Selain itu dengan terlaksananya program 100% prasarana sanitasi MCK/Jamban Sehat, mengurangi luasan permukiman kumuh di beberapa wilayah yang menjadi titik terlaksananya program.

Program ini juga memiliki dampak positif untuk meminimalisir pencemaran lingkungan. Walaupun tidak semuanya bisa dijangkau, setidaknya dari data desa 20% belum memiliki prasarana MCK bisa berkurang atau teratasi.

2) Tercapainya upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat dan pencegahan kumuh⁹

⁸ Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*, Jakarta, 2016, hlm. 4

Setelah mendapatkan sosialisasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta di imbangi dengan pelaksanaan pembangunan jamban sehat, dapat menunjang program KOTAKU untuk mengubah perilaku dan kebiasaan dari masyarakat. Ini juga di tunjang dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh UPL BKM ANUGERAH serta fasilitator KOTAKU.

setelah evaluasi yang dilakukan oleh pihak BKM serta fasilitator KOTAKU dengan Bapak Syukur, Bapak Joko dan Bapak Muh Nur, pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan tiga bulan sekali dalam kurun waktu 1 tahun.

Bantuan jamban sehat tersebut diaplikasikan dengan baik oleh para penerima manfaat. Sebagaimana penuturan dari Bapak Syukur selaku fasilitator dengan adanya perawatan untuk bangunan jamban sehat, perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sehat serta menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat.

Tujuan dari program KOTAKU dipandang sesuai dengan teori dari tujuan pengembangan

⁹ Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Op. Cit., *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*, Jakarta, 2016, hlm. 4

masyarakat yaitu mengentaskan masyarakat dari segi kemiskinan, meningkatkan status kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang kehidupan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program KOTAKU dengan hakikat dari tujuan pengembangan masyarakat sama-sama mengedepankan penanggulangan kemiskinan serta mempunyai tujuan yang sama untuk merubah perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata.

b. Target Program KOTAKU

Target program KOTAKU dilingkup Desa Krajankulon adalah base line 100-0-100. Base line 100-0-100 merupakan penerapan dari program pengentasan permukiman yang disesuaikan dengan realita permasalahan yang ada di Desa Krajankulon. Permasalahan di Desa Krajankulon sangat komplek, diantaranya Desa Krajankulon masuk dalam SK kumuh Bupati, karena masih banyak permukiman di Desa Krajankulon dalam kategori kumuh. Adapun wilayah

¹⁰ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 36-37

yang masih dianggap sebagai permukiman kumuh menurut pengumpulan data yang dilakukan oleh BKM ANUGERAH pada tahap sebelumnya dan kemudian data tersebut direview sesuai data base line.

Setelah dilakukan proses perencanaan melalui pemetaan swadaya dan skala prioritas, maka di capai sebuah kesepakatan mengenai program yang dilaksanakan adalah 100% pengadaan prasarana MCK/Jamban Sehat. Karena masih banyak warga yang belum memiliki fasilitas jamban sehat, dari data yang diperoleh ada 67 kepala keluarga atau rumah yang belum memiliki fasilitas jamban. Pada tahun 2015 selama kurun waktu 1 tahun program KOTAKU untuk target 100% masyarakat mendapat sanitasi layak dapat terlaksana di Desa Krajankulon, walaupun tidak semua bisa di jangkau, namun bisa mengurangi 50% dari keseluruhan karena ini di tentukan oleh skala perioritas. Pada bab sebelumnya telah di jelaskan oleh faskel Bapak Solikhun, Bapak Joko dan Bapak Syukur, untuk memenuhi target dari pelaksanaan program tidak terlepas dari acuan data base line 100-0-00, sehingga pelaksanaan bisa sesuai dengan standar.

Jadi dari 3 target KOTAKU yaitu base line 100-0-100 tersebut target 100% masyarakat mendapat prasarana MCK tercapai sesuai dengan target. Pencapaian ini

dibuktikan dengan terlaksananya 24 bangunan MCK dalam kurun waktu 1 tahun.¹¹

Target program KOTAKU menurut data base line 100-0-100, salah satunya 100% akses sanitasi berusaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat melalui penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat, berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa hasil dari program memang dirasakan cukup baik oleh masyarakat.

¹¹ Data dari BKM ANUGERAH Desa Krajankulon, tanggal 14 November 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah tentang model pengembangan masyarakat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Analisis di Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu Kabupten Kendal), maka dapat di tarik kesimpulan sebagai jawaban berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Model pengembangan masyarakat melalui Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Krajankulon, yaitu :

Tahapan Perencanaan, tahapan perencanaan program KOTAKU di Desa Krajankulon menggunakan model pengembangan masyarakat perencanaan sosial. Dalam proses penyelesaian masalah dalam sebuah program tidak terlepas adanya perencanaan. Proses perencanaan sosial lebih menekankan pada “tujuan tugas”, dimana pada tahap persiapan ini di mulai dari sosiaisasi, perancangan pesan, penggalangan relawan sampai penguatan kelembagaan, dan kemudian pada tahap perencanaan di mulai dari tahap kegiatan pemetaan wilayah sampai pelaksanaan pemetaan swadaya selalu melibatkan

partisipasi dari masyarakat dan masyarakatlah yang menjadi subyek dalam tahapan pelaksanaan program serta pelaksanaan program diserahkan 100% oleh masyarakat. dengan begitu perencanaan program bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat serta kebutuhan lingkungan yang ada di Desa Krajankulon.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan menggunakan model pengembangan aksi sosial. Aksi sosial lebih menekankan pada tujuan proses dan tujuan hasil melalui penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan actual. Pada tahap ini masyarakat diberikan pemahaman, penyadaran, dan pemberdayaan melalui berbagai kegiatan sosialisasi mengenai PHBS serta pelatihan seperti pelatihan OJT (On The Job Training), pelatihan KSM, pelatihan Relawan dan TIPP. Dengan adanya berbagai pelatihan tersebut maka masyarakat bisa memahami dan mempraktekkan dalam penyelesaian program. Program KOTAKU telah menggerakkan masyarakat untuk bekerja secara mandiri dengan adanya KSM (kelompok swadaya masyarakat) yang bertanggung jawab terhadap program mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Peran kerja KSM bisa berjalan dengan baik karena dapat menggunakan biaya pembangunan sesuai dan tepat waktu.

2. Hasil Pengembangan Masyarakat melalui Program KOTAKU di Desa Krajankulon.

Pada pelaksanaan program KOTAKU tidak terlepas dari tujuan serta target dari program KOTAKU, karena tujuan dan target merupakan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah program. Program KOTAKU yang dilaksanakan di Desa Krajankulon sudah mengacu pada tujuan serta target KOTAKU base line 100-0-100.

Jika dilihat dari sisi aspek tujuan, maka pelaksanaan program KOTAKU sudah sesuai tujuan, diantaranya:

- a. Menurunnya luas permukiman kumuh.
Dengan terlaksananya program base line 100% penyediaan prasarana Jamban Sehat, telah mengurangi sebagian wilayah yang belum memiliki akses prasarana Jamban Sehat.
- b. Tercapainya upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat dan pencegahan kumuh. Untuk mengubah pola pikir masyarakat kearah peningkatan kualitas kesehatan, maka melalui kegiatan sosialisasi PHBS dan di imbangi dengan pembangunan prasarana MCK/ Jamban Sehat, dengan begitu masyarakat telah memperbaiki

kualitas kesehatan serta menerapkan pola perilaku hidup bersih dan adanya pemeliharaan yang diserahkan kepada masyarakat serta KPP (kelompok pemeliharaan dan perawatan) dengan begitu menurunnya tingkat pencemaran lingkungan.

Selain dari sisi aspek tujuan, program KOTAKU yang dilaksanakan di Desa Krajankulon telah terlaksana sesuai target base line 100-0-100, dimana untuk tahun 2015 target yang ingin di capai terlebih dulu adalah target 100% penyediaan prasarana Jamban Sehat, selain itu juga diperkuat oleh permintaan dari masyarakat. maka pelaksanaan pembangunan prasarana jamban sehat sudah sesuai dengan tujuan serta target base line 100-0-100 dari KOTAKU.

B. Saran

- 1) Tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, melalui program KOTAKU yang dilakukan oleh BKM ANUGERAH Desa Krajankulon serta di dampingi oleh Fasilitator KOTAKU tingkat Kabupaten, tetaplah di pertahankan dan di tingkatkan

guna mencapai target 0% permukiman kumuh dan layak huni, dimana partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat menjadi pelaku dalam sebuah proses.

- 2) Diharapkan target base line 100-0-100, dapat tercapai dan terlaksana secara menyeluruh, sehingga dapat mencapai 0% rumah kumuh, layak huni, produktif dan berkelanjutan.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan keridho'an-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini memberi kemanfaatan bagi pembaca. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, dan semoga Allah senantiasa memberi rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin ya rabbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Bandung, PT Remaja rosdakarya, 2013, hlm 13
- Aziz, Moh Ali, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2009)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quraan dan Terdjemahnja*, (Jakarta, JAMUNU, 1969)
- Ife Jim, Tesoriero Frank, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*, (PUSTAKA PEAJAR, Yogyakarta, 2008)
- Herdiansyah, Haris *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Salemba Humanika, Jakarta 2012)
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*,(Jakarta, 2016)
- Sitompul F, Rislina, *Merancang Mode Pengembangan Masyarakat Pedesaan dengan Pendekatan System Dynamics*, (Jakarta, LIPI Press, 2009)
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, ALFABETA, 2014)
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2014)
- Tonny Nasdian, Fredian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)

- Totok, Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung, ALFABETA, 2013)
- Wahidin D, Roestanto, *Membangun Perdesaan Modern*, (Jakarta, Gajah Hidup, 2015)
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta, Kencana Media Group, 2013)
- Andi Maya Purnamasari. “*Pengembangan masyarakat untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan*”. dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 22. No. 01. April 2011
- Anna Fatchlya”*Model Aksi Sosial pada Masyarakat Petambak di Wilayah Pesisir Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi*”, dalam *Jurnal Buletin Ekonomi Perikanan*, Vol. VIII. No. 2, Tahun 2008.
- Ardhana Januar Mahardhani. “*Pengembangan Masyarakat Pesisir Di Tulung Agung*” dalam *jurnal Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*. ISBN 978-979-3649-81-8. 2010
- Asep Supriatna, “*Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Desa*”, dalam *Jurnal Lingkar Widyaishwara*, Vol. 1, No.1, Jan-Mar 2014
- Astridya Paramita, Lusi Kristiana, “*Teknik Focus Group Discussion dalam Penelitian Kualitatif*”, dalam *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 16, No 2, April, 2013

Dewi Sawitri, “*Profesi Perencanaan Dalam Perencanaan Partisipatif Suatu Kajian Teori dan Praktek Perencanaan*”, dalam *Jurnal Kesehatan* , No 23 a, Juni 2004

Endang Sutisna, dkk, “*Aplikasi Model Precede-Proceed pada Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Berbasis Penilaian Kebutuhan Kesehatan Masyarakat*”, dalam *Jurnal Kedokteran Yasri*. Vol.23, No. 3, Tahun 2015

Kamaludin, “*Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam (Konsep Dasar dan Arah Pengembangan)*”, dalam *Jurnal Dakwah dan Pengembangan*, Vol. VIII, No. 02, Juli 2014.

Muhtar, Pengembangan. “*Masyarakat dengan Memanfaatkan Aset Lokal*”. Dalam *Jurnal SosioKonsepsia*. Vol. 17. No. 01. 2012.

Sri Wahyuni, “*Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian: Perlunya Implementasi “PRA” Pendekatan Sektoral dan Kultural*”. Dalam *Jurnal Pengembangan Ekonomi Pertanian Bogor*.

Wawancara dengan Bapak Solikhun (Koordinator Faskel KOTAKU) tingkat kabupaten Kendal, tanggal 12 November 2017

Wawancara dengan Bapak Zumarul Faizin (Koordinator BKM ANUGERAH), Desa Krajankulon, tanggal 13 November 2017

Wawancara dengan Bapak Syukur (Faskel KOTAKU) Tingkat Kabupaten Kendal, tanggal 12 November 2017

Wawancara dengan Bapak Muh Nur selaku (UPL BKM ANUGERAH) Desa Krajankulon, tanggal 13 November 2017

Wawancara dengan Bapak Misnadi, selaku (penerima manfaat jamban sehat program KOTAKU) Desa Krajankulon, tanggal 15 November 2017

Wawancara dengan Bapak Widodo selaku (penerima manfaat jamban sehat program KOTAKU) Desa Krajankulon, tanggal 15 November 2017

Wawancara dengan Ibu Azizah selaku (penerima manfaat jamban sehat program KOTAKU) Desa Krajankulon, tanggal 15 November 2017

Mohammad (PEMDES), Data Profil Desa dan Perkembangan Desa tahun 2016 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Taun 2016

<http://bafeto.blogspot.co.id/2012/12/11/perbedaan-dan-persamaan-model-dan-teori/.html>

Data BPS –Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id>

Hasil Wawancara

Identitas Informan 1

Nama Informan : Bapak Solikhun
Jabatan : Koordinator Fasilitator KOTAKU
Tgl Wawancara : 12 November 2017
Waktu : 13.30-15.30

No	Pertanyaan
1.	<p>Sebagai fasilitator serta pendamping dalam program KOTAKU, menurut anda apa yang mendasari program KOTAKU bisa terlaksana di Desa Krajangkulon?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Sebenarnya program KOTAKU ini sifatnya melanjutkan dari program yang sebelumnya, dan sasaran dari dari program KOTAKU ini adalah tempat yang pernah dijamah oleh program sebelumnya seperti P2KP, PNPM Mandiri perkotaan, P2KKP.</p>
2.	<p>Apa yang menjadi indikator, sehingga Desa Krajangkulon terpilih untuk terlaksananya program base line 100-0-100 ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>karena desa krajangkulon mendapatkan SK kumuh dari Bupati, sehingga desa krajangkulon perlu di jamah untuk penyelesaian masalah wilayah yang masih masuk kategori kumuh.</p>
3.	<p>Bagaimana alur berjalannya program KOTAKU? Baik itu dari awal sampai dengan pelaksanaan. ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>untuk alurnya menurut acuan SOP kerja yang ada di buku pedoman dan yang nantinya menjadi acuan kita untuk melaksanakan program dilapangan, dimulai dari tahap persiapan, perencanaan sampai pelaksanaan.</p>
4.	<p>Apakah dalam setiap kegiatan program KOTAKU selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Ya tentu, karena untuk program KOTAKU yang nantinya menjalankan adalah masyarakat itu sendiri, jadi program KOTAKU ini benar-benar 100% diserahkan oleh masyarakat</p>

	dengan tujuan supaya masyarakat dapat mengembangkan diri, mandiri dan bertanggung jawab, dana yang dikeluarkan oleh pemerintahpun langsung ketangan masyarakat tanpa adanya perantara dari anggota-anggota dewan.
5.	<p>Apakah semua masyarakat dapat ikut andil dalam proses program KOTAKU ? atau hanya orang-orang terpilih saja ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>yang diharapkan masyarakat itu bisa ikut terlibat semua mulai dari anak muda, dewasa sampai orang tua, oleh karena itu diadakannya penggalangan relawan, dalam penggalangan tanpa ada paksaan, artinya merekalah yang mengajukan diri dan mau bekerja ikhlas tanpa upah, tujuannya adalah membangun kepedulian dari masyarakat.</p>
6.	<p>Apa yang menjadi indikator prioritas penyelesaian base line 100-0-100 di Desa Krajankulon?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Wilayah yang belum memiliki akses air bersih, wilayah yang masih masuk kategori kumuh, dan wilayah yang masyarakatnya banyak yang belum memiliki akses sanitasi, karena target base line adalah 100% akses air bersih, 0% luasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi</p>
7.	<p>Menurut anda apa yang menjadi kendala mereka sulit untuk memiliki MCK selain karna faktor materil?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Karena faktor ekonomi, dimana pendapatan mereka dibawah standar atau pas-pasan</p>
8.	<p>Bagaimana proses penyadaran bagi masyarakat penerima manfaat sampai dengan pembangunan, pengembangan/pemberdayaan jamban sehat bisa terlaksana?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Untuk proses penyadaran kita melakukan sosialisasi PHBS bekerjasama dengan bidan desa, kemudian juga diimbangi dengan adanya pembangunan prasarana fasilitas mck/jamban sehat, supaya hasilnya bisa maksimal untuk merubah kebiasaan buruk mereka yang BAB sembarangan.</p>
9.	Apakah dalam alur proses pelaksanaanya menggunakan

	<p>metode pengembangan masyarakat, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RRA (Rapid Rural Appraisal) RRA merupakan sebuah metode penilaian keadaan desa secara cepat, dimana kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh orang luar. Teknik RRA antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Review/ telaah data sekunder, ini termasuk pengamatan peta wilayah dan pengamatan lapangan. b. Observasi atau pengamatan lapangan secara langsung. c. Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya. d. Pemetaan dan pembuatan grafik atau diagram. e. Studi kasus, sejarah dan biografi. f. Pembuatan kuesioner sederhana dan singkat g. Pembuatan laporan lapangan secara cepat 2. PRA (Participatory Rapid Appraisal) PRA merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif , yang dilakukan pada tahap awal perencanaan kegiatan. 3. FGD (Focus Group Discussion) <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta. Definisi lain, FGD adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data kualitatif; di mana sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator mengenai suatu topic. Jawaban : Iya sesuai, didalam buku SOP panduan KOTAKU juga begitu
10.	<p>Menurut anda apakah program jamban sehat ini sudah terlaksana sesuai tujuan ?</p> <p>Jawaban : iya sudah sesuai dengan tujuan kotaku</p>

	<p>Dan manfaatnya ? dan apakah dengan adanya program “jamban sehat”, jika dilihat dari sisi pemahaman PHBS sudah masuk kriteria dalam indicator rumah tangga yang per PHBS?</p> <p>Jawaban :</p> <p>untuk manfaat bagi masyarakat, mereka sudah tidak kesusahan lagi untuk mencari tempat ketika akan membuang hajat, setelah kami tim fasilitator melakukan evaluasi tampak adanya perubahan dari segi pemahaman mengenai kebersihan, adanya perawatan dan pemeliharaan.</p>
--	---

Identitas Informan 2

Nama : Zumarul Faizin
Jabatan : Koordinator BKM ANUGERAH
Tanggal Wawancara : 13 November 2017
Waktu Wawancara : 15.15-17.30

1. Anda sebagai koordinator BKM ANUGERAH, bagaimana BKM bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada program KOTAKU di Desa Krajangkulon? Kemudian melalui media apakah ?

Jawaban :

setelah kami diundang dari korkot KOTAKU dikabupaten kendal mengenai pengenalan dan pemahaman mengenai program KOTAKU, langkah kita selanjutnya adalah mensosialisasikan ke warga pertama melalui pamlet, kemudian dari BKM mengadakan forum seperti lokakarya atau seminar mengenai pengenalan program KOTAKU, di dalam forum tersebut mengundang tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, PEMDES.

2. Setelah adanya penjelasan dari faskel KOTAKU bahwa sebelumnya dari BKM sudah diberikan sosialisasi mengenai program KOTAKU, kemudian apa langkah BKM selanjutnya ?

Jawaban :

mensosialisasikan ke warga desa krajangkulon melalui pamflet dan forum lokakarya

3. Desa Krajangkulon masuk dalam SK Kumuh Bupati sehingga program KOTAKU, apakah dari pihak BKM sudah melakukan pengamatan mengenai wilayah-wilayah yang menjadi indikator SK Kumuh Bupati?

Jawaban :

Sudah, dari BKM sudah melakukan pengamatan di lapangan didampingi oleh tokoh masyarakat setempat mengenai titik-titik wilayah kumuh.

4. Setelah mendapatkan keterangan dari bapak solikhun dan bapak syukur selaku fasilitator KOTAKU, bahwa partisipasi dari masyarakat merupakan menjadi faktor utama dimana

untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat maka di adakan penggalangan relawan,. Siapa sajakah yang menjadi relawan dalam pelaksanaan program KOTAKU, apakah ada riteria khusus untuk menjadi relawan?

Jawaban :

Untuk menjadi relawan tidak ada kriteria khusus hanya saja dia mau mendedikasikan dengan ikhlas tanggung jawan dan tanpa pamrih, karena ini sifat tidak upah atau gaji.

5. Apakah ada kegiatan pelatihan-pelatihan untuk relawan? ada
6. Apa yang menjadi bidikan penyelesaian masalah yang disesuaikan dengan data base line 100-0-100 untuk Desa Krajangkulon?

Jawaban :

Untuk program awal karena usulan dari warga yang paling banyak adalah mengenai akses sanitasi, maka program pertama yang kita selesaikan adalah 100% akses sanitasi.

7. Bagaimana peran BKM dalam menentukan obyek penerima manfaat dalam rogram KOTAKU?

Jawaban :

Peran BKM hanya sebagai fasilitasi dan mendampingi, untuk penentuan obyek penerima manfaat kami melibatkan partisipasi dari masyarakat serta tokoh masyarakat. Dengan adanya penentuan skala prioritas.

8. menentukan penerima manfaat ?

Jawaban :

Ada 3 indikator skala prioritas, benar-benar tercatat sebagai warga miskin, ketidakmampuan memiliki MCK, lahan milik sendiri

9. Bagaimana pelaksanaan dari pembangunan program KOTAKU ?
10. Bagaiaman menurut pendapat dan pandangan anda mengenai hasil dari pelaksanaan program KOTAKU menurut data base line 100-0-100

Identitas Informan 3

Nama : Muh Nur
Jabatan : Unit Pengelola Lingkungan
Tanggal Wawancara : 13 November 2017
Waktu Wawancara : 18.30-20.00

1. Jika mengacu pada SK Kumuh Bupati, wilayah manakah yang masuk dalam indikator kumuh?

Jawaban :

Menurut pengamatan dari pihak BKM ANUGERAH RW 07 dan RW 11

2. Jika dilihat dari hasil kegiatan pelatihan OJT, KSM dan TIPP, apakah ada pembentukan KSM untuk menangani program KOTAKU ?

Jawaban :

Ada, pembentukan KSM untuk melaksanakan program yang menerima manfaat jamban sehat

3. Anda sebagai UPL BKM ANUGERAH, bagaimana tahapan anda dalam memonitoring pelaksanaan dari pembangunan jamban sehat? Apa yang menjadi indikator monitoring yang dilakukan oleh anda sebagai UPL?apakah standar monitoring disesuaikan dengan standar dari KOTAKU?

Jawaban :

Iya, pertama sebelum dimulai kita melihat rumah yang akan diberi manfaat MCK/jamban sehat. 1 rumah itu harus milih sendiri 2. Diharuskan 10 m jarak dari WC ke sepi tenk, 3. Dia termasuk kategori miskin. Untuk pelaksanaan memberikan pengarahan kepada pelaksana pembangunan 1. Pralon harus sesuai standar RAB, 2. Tempat duduk untuk BAB harus sesuai standar, 3. BONK atau sepi tenk harus sesuai standar, waktu harus sesuai yang direncanakan, kurang lebih biasanya 2 minggu. Setelah dipastikan penerima manfaat kemudian dikumpulkan dan diberikan pengarahan kemudian dibentuk KSM oleh koordinator BKM atau UPL, anggotanya terdiri dari penerima manfaat. Dana bantuan berupa simulan 75% dana dari KOTAKU dan 25% dari swadaya penerima manfaat. Dana itu turun bertahap 30%, 60 % dan 10%.

Kemudian besar dana bantuannya kurang lebih 3 juta. Dalam pelaksanaan dimonitoring minimal 3 kali dalam 2 minggu, setelah pembangunan selesai dibentuklah kelompok panitia pemeliharaan dan perawatan anggotanya dari anggota KSM.

4. Setelah pelaksanaan pembangunan selesai apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh pihak BKM/ fasilitator ?

Jawaban :

Ada, evaluasi dilakukan 3 bulan sekali dalam kurung waktu 1 tahun, dari faskel korkot, BKM, UPL, meninjau ulang kepada masyarakat penerima manfaat mck/jamban sehat dengan tujuan apakah ada perawatan dan pemeliharaan dari penerima manfaat dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Identitas Informan 4

Nama Informan : Bapak Misnadi
Alamat : RT 07/ RW 08
Nama KSM : Segar Berseri 2
Tgl Wawancara : 15 November 2017
Waktu : 10.30-11.30

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana pola perilaku atau kebiasaan anda mengenai BAB sebelum memiliki fasilitas MCK? Jawaban : Karena saya tidak memiliki mck jadinya saya kalau mau bab di sungai, kadang di WC umum.
2.	Apakah yang menjadi penyebab atau kendala bagi anda ketika anda ingin mempunyai fasilitas MCK, baik itu kendala dari faktor ekonomi maupun yang lainnya? Jawaban : Kendalanya dari uang mba, untuk kebutuhan sehari-hari saja kami masih kekurangan, kami makan juga seadanya, jadi untuk memiliki MCK sendiri itu sulit bagi kami mba.
3.	Mengapa tidak ada upaya dari anda untuk memiliki atau membangun fasilitas MCK dirumah anda ? Jawaban : kalau keinginan untuk memiliki mck itu ada mba, tapi mau gimana lagi karna faktor uang tidak ada jadinya kita sulit untuk memilik fasilitas mck sendiri.
4.	Seberapa besar dana yang harus anda keluarkan apabila anda ingin membuat fasilitas MCK? Jawaban : Kemungkinan 2-3jutaan mba
5.	Apakah dengan tidak adanya fasilitas MCK dirumah anda berdampak pada kesehatan keluarga anda ? Jawaban : Iya mba, kadang keluarga saya mengalami gatal-gatal karena BAB disungai, kondisi sungainya pun kotor, kadang air

	kalinya kering gak ada airnya, jadinya banyak serangga yang gigit, kadang keluarga saya juga diare entah karena faktor apa saya kurang tahu.
6.	<p>Ketika anda terpilih menerima BLM dari KOTAKU mengenai program Jamban Sehat, apakah ada sosialisasi yang diberikan dari pihak BKM ? Baik itu mengenai teknik dari pelaksanaan pembangunan jamban sehat? Atau mengenai PHBS?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Ada mba, tentang cara menjaga perilaku bersih, terus tentang nanti teknis dari pelaksanaan pembangunan</p>
7.	<p>Berapa dana dari BLM KOTAKU dalam membangun fasilitas jamban sehat?</p> <p>Jawaban :</p> <p>3 juta mba</p>
8.	<p>Apakah ada monitoring dari pihak BKM/ FASKEL dalam proses pelaksanaan pembangunan jamban sehat ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>ada mba</p>
9.	<p>Setelah anda mendapat BLM dari KOTAKU dalam program jamban sehat, apa manfaat yang ada rasakan setelah memiliki fasilitas MCK pribadi ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Manfaatnya sangat besar mba bagi keluarga saya dengan adanya bantuan tersebut kami tidak kesulitan lagi saat ingin buang hajat.</p>
10.	<p>Apakah ada pemeliharaan atau perawatan untuk jamban?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Ada mba, saya dan keluarga selalu membersihkannya setiap sehari sekali, kami juga menjaga kebersihan rumah walaupun rumah kami sederhana.</p>
11.	<p>Setelah pembangunan jamban selesai , dari pihak BKM apakah selalu meninjau? Atau mengadakan evaluasi ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Ada mba</p>
12.	Apakah ada peningkatan PHBS dalam rumah tangga anda setelah mendapat bantuan fasilitas jamban sehat?

	<p>Jawaban :</p> <p>Iya mba, kami jadi tahu untuk pentingnya menjaga kebersihan rumah.</p>
13.	<p>Bagaimana cara anda menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari anda?</p>

LAMPIRAN

PROSES KEGIATAN PROGRAM KOTAKU

SOSIALIASI PROGRAM KOTAKU LEWAT MMT



PELATIHAN KSM DI SMK NU 4 KALIWUNGU



SOSIALISASI AWAL PENGENALAN PROGRAM KOTAKU TINGKAT KABUPATEN



REMBU WARGA BERSAMA BKM ANUGERAH
MELAKUKAN PEMETAAN DAN SKALA PRIORITAS



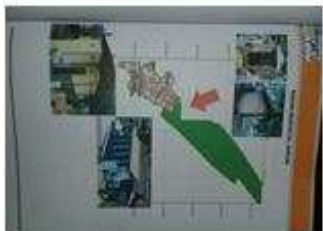
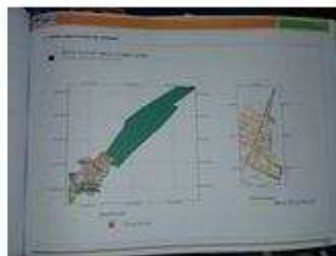
PELATIHAN KAPASITAS MASYARAKAT TINGKAT DESA



PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JAMBAAN SEHAT



PENMETAAN WILAYAH



PELATIHAN RELAWAN

PELATIHAN BKM, KADES DAN PEMDES



PELATIHAN OJT

PELATIHAN TIPP

ON THE JOB TRAINING



FOTO BARENG KOORDINATOR
BKM ANUGERAH



TIM INISIATIF PERENCANA PARTISIPATI



WAWANCARA DENGAN FASKEL
KOTAKU



WAWANCARA DENGAN UPL BKM ANUGERAH



FOTO BARENG PENERIMA MANFAAT



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOLIKHUN

Jabatan : Senior Fasilitator Tim 2

Menerangkan

Nama : Indah Nur Fitrianiingsih

Nim : 131411016

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian di BKM ANUGERAH Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2017/2018 semester ganjil dengan judul : "Model Pengembangan Masyarakat melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi Analisis di Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal).

Kendal, 21 Desember 2017

* * Senior Fasilitator

Tim 2


SOLIKHUN, ST.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zumarul Faizin

Jabatan : Koordinator BKM ANUGERAH

Menerangkan

Nama : Indah Nur Fitriyaningsih

Nim : 131411016

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian di BKM ANUGERAH Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2017/2018 semester ganjil dengan judul : "Model Pengembangan Masyarakat melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi Analisis di Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal).

Kendal, 21 Desember 2017

Koordinator

BKM ANUGERAH



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaenul Arifin

Jabatan : Kepala Desa Krajankulon

Menerangkan

Nama : Indah Nur Fitrianiingsih

Nim : 131411016

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian di Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2017/2018 semester ganjil dengan judul : "Model Pengembangan Masyarakat melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi Analisis di Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal).

Kendal, 21 Desember 2017

Kepala Desa Krajankulon

Kecamatan Kaliwungu



BIODATA PENULIS



A. Indentitas Diri

Nama : Indah Nur Fitrianingsih
Nim : 131411016
TTL : 21 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Anyar, RT 02/ RW 08, Desa
Krajankukon, Kecamatan
Kaliwungu, Kabupaten Kendal
Agama : Islam

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. SD N 2 Krajankulon | Lulus 2006 |
| 2. SMP N 3 Kaliwungu | Lulus 2009 |
| 3. MAN Kendal | Lulus 2013 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | Lulus 2018 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Januari 2018

Penulis

Indah Nur Fitrianingsih
131411016